

**PENGALAMAN PSIKOLOGIS ISTERI-ISTERI
TRANSMIGRAN ANGKATAN DARAT MANTAN PRRI
(1958-1971)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata 1
(S1) pada program studi Pendidikan Sejarah*



Oleh:

RINI WULANDARI

60880/ 2004

**PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGALAMAN PSIKOLOGIS ISTERI-ISTERI TRANSMIGRASI ANGKATAN
DARAT MANTAN PRRI (1958-1971)**

Nama : Rini Wulandari
NIM/BP : 60880/2004
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Siti Fatimah,M.Pd,M.Hum

NIP.196102181984032001

Pembimbing II

Drs. Etmi Hardi,M.Hum

NIP.196703041993031003

Ketua Jurusan

Hendra Naldi. S.S,M.Hum

NIP:196909301996031001

PENGESAHAN

***Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi Program Studi
Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Padang***

Judul : **PENGALAMAN PSIKOLOGIS ISTERI-ISTERI
TRANSMIGRAN ANGKATAN DARAT MANTAN
PRRI (1958-1971)**

Nama : **Rini Wulandari**

NIM : **60880**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Jurusan : **Sejarah**

Fakultas : **Ilmu Sosial**

Padang, Februari 2011

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua	: Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum	1. _____
2. Sekretaris	: Drs. Etmi Hardi, M.Hum	2. _____
3. Anggota	: Drs. Emizal Amri, M.Pd, M.Si	3. _____
4. Anggota	: Hendra Naldi, S.S, M.Hum	4. _____
5. Anggota	: Abdul Salam, S.Ag, M.Hum	5. _____

ABSTRAK

Rini wulandari: Pengalaman Psikologis Isteri-Isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI (1958-1971). Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2011.

Skripsi ini merupakan kajian Sejarah Tematis dengan memilih tema tentang Isteri-isteri TNI Mantan PRRI. Kajian dalam skripsi ini menggambarkan tentang pengalaman para isteri dalam menghadapi peristiwa PRRI hingga mereka menempati rumah pembagian di daerah Transmigrasi Angkatan Darat Pesisir Selatan. Terlebih dahulu peneliti melihat pengalaman Isteri-isteri TNI Mantan PRRI pada masa PRRI, kemudian baru dilanjutkan dengan pengalaman Isteri-isteri TNI Mantan PRRI pada pasca PRRI. Studi ini bertujuan menjelaskan dan mengungkapkan pengalaman yang dialami oleh Isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI dalam menghadapi peristiwa PRRI di Sumatera Barat dan mendeskripsikan kehidupan yang dialami Isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI selama tinggal di daerah Transmigrasi Angkatan Darat.

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan Sejarah tematis. Oleh sebab itu, sesuai dengan kaidah penelitian sejarah dilakukan empat tahap. Tahap pertama heuristik, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan memanfaatkan sumber-sumber primer seperti arsip dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI yang terlibat langsung dalam peristiwa PRRI dan menempati Transad. Data sekunder berasal dari buku-buku dan skripsi yang menunjang data primer. Tahap kedua kritik sumber, yaitu melakukan pengujian data melalui kritik internal dan eksternal. Tahap ketiga yaitu analisa interpretasi data yang didapat. Tahap keempat mendeskripsikan data dalam bentuk penulisan ilmiah (skripsi).

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa pergolakan PRRI membawa dampak yang signifikan dibidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya Isteri-isteri TNI Mantan PRRI yang suaminya secara langsung ikut terlibat dalam peristiwa PRRI. Pengalaman yang mereka alami bukan berupa dampak kekerasan fisik seperti dianiaya dan diperkosa, melainkan dampak psikis (kejiwaan) seperti tekanan sosial akibat cap sejarah sebagai pemberontak. Selama pergolakan PRRI berlangsung isteri-isteri TNI Mantan PRRI merasakan beban mental yang harus ditanggung seperti; mengikuti suami ke dalam hutan, sebagian isteri berjuang tanpa suami untuk membesarkan anak-anaknya, mendapat ancaman terror, dan penghinaan sebagai “pemberontak”. Secara fisik, pergolakan tersebut telah usai, namun pengalaman pahit ini masih dirasakan oleh isteri-isteri TNI Mantan PRRI setelah menempati Transmigrasi Angkatan Darat yang pada umumnya terdapat pensiunan TNI, tidak terkecuali TNI Mantan tentara pusat yang pernah menjadi musuh mereka masa PRRI. Secara struktur, mereka telah diberi hak-hak TNI kembali, salah satunya adalah mendapatkan satu unit rumah dan 2,5 Ha tanah secara cuma-cuma di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, di tempat ini pulalah secara psikologis mereka masih mengalami tekanan sosial akibat cap sejarah sebagai “pemberontak” yang telah memecah belah persatuan Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang menjadi sumber dari segala rahmat untuk semesta, dan meridhoi karya “kacil” ini ada. Semoga shalawat dan salam kesejahteraan yang paling suci dari Allah SWT selalu dicurahkan kepada sang guru bagi umat manusia, Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan Srata Satu (S1) pada program studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Subyektif penulis mengangkat tentang *Pengalaman Psikologis isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat mantan PRRI (1958-1971)* menjadi skripsi, merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab moral sebagai anak Transmigran yang lahir dan hidup di daerah Transmigrasi Angkatan Darat Kabupaten Pesisir Selatan. Mencoba merangkai fakta yang terlupakan dalam sejarah PRRI yang panjang, tantang pengalaman psikologis para Isteri Transmigran Angkatan Darat mantan PRRI.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dorongan moril serta materil dari berbagai pihak. Atas segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum, selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Tim pembahas dan penguji Drs. Emizal Amri, M.Pd, M.Si, Hendra Naldi, S.S, M.Hum, dan Abdul Salam, S.Ag, M.Hum, yang banyak meluangkan waktunya menghadiri serta memberikan masukan ketika seminar dan siding skripsi.
3. Bapak Hendra Naldi, S.S, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Sejarah, Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Sejarah, Staf Dosen serta Karyawan dan karyawan Jurusan Sejarah yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Istri-Istri Transmigran Angkatan Darat mantan PRRI beserta seluruh keluarga dan rekan-rekan Istri-Istri Transmigran Angkatan Darat mantan PRRI, yang telah bersedia memberikan data lisan maupun tulisan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu narasumber yang dengan senang hati diganggu aktifitasnya, untuk memberikan data-data dalam cerita yang sangat membantu dalam sumber primer penulisan skripsi ini.

Sebagai manusia yang masih harus belajar banyak, penulis menyadari skripsi ini mungkin bukanlah sebuah karya yang sempurna. Harapan penulis semoga para pembaca sudi memberikan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT lah kita berserah diri, Yang Maha luas Ilmu-Nya dan bijaksana.

Padang, Februari 2011

Penulis

Rini Wulandari

DATAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan dan rumusan masalah.	7
C. Tujuan dan manfaat penulisan	8
D. Tinjauan pustaka	9
E. Metode penelitian	16
 BAB II. GAMBARAN UMUM PERGOLAKAN PRRI DI SUMATERA BARAT	
A. Pergolakan PRRI di Sumatera Barat	
1. Latar belakang pergolakan.	20
2. Jalannya pergolakan.....	24
3. Akhir pergolakan.	26
B. Pengalaman isteri-isteri TNI mantan PRRI pada masa Pergolakan PRRI	
1. Mengikuti suami masuk hutan.	31
2. Masa perang.	35
3. Membesarkan anak-anak tanpa suami.	38
4. Keluar hutan.	40

BAB III. KEHIDUPAN ISTERI-ISTERI TRANSMIGRAN ANGKATAN

DARAT MANTAN PRRI PASCA PRRI

- A. Berjuang kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi..... 43
- B. Hidup penuh intimidasi..... 48
- C. Mencari kehidupan yang layak di bawah himpitan ekonomi..... 58

BAB IV. PENUTUP

- A. Ringkasan..... 63
- B. Kesimpulan..... 65
- C. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENGALAMAN PSIKOLOGIS ISTERI-ISTERI TRANSMIGRAN ANGKATAN DARAT MANTAN PRRI (1958-1971)

A. Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian orang, perang merupakan sebuah cara yang dipandang sebagai solusi dalam mengatasi konflik¹. Dalam hal ini juga berdampak buruk terhadap kaum perempuan dan anak-anak yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik tersebut. Selain kondisi fisik yang lemah, mereka adalah pihak yang tidak bersenjata, dan sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari pihak-pihak yang terlibat perang. Oleh karena itu, perempuan sering kali dijadikan sebagai tameng dalam situasi perang untuk melumpuhkan pihak-pihak lawan². Pengalaman-pengalaman yang mereka alami selama terjadinya perang akan berdampak buruk bagi fisik maupun psikologis mereka, hal ini jarang diungkapkan dan hanya menjadi catatan kacil dalam sejarah.

Peristiwa perang juga dirasakan masyarakat Sumatera Barat pada masa PRRI (1958-1961). Situasi daerah ini menjadi tidak stabil baik dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, setelah dilakukannya operasi penumpasan PRRI oleh APRI³. Sebagaimana di daerah konflik lainnya, di daerah ini perempuan atau isteri yang mendukung PRRI juga mengalami nasib yang sama seperti ; diteror, ditawan, diancam, dikejar-kejar dan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari pihak lawan (tentara

¹Departemen pertahanan dan keamanan Nasional, *"Sistem pertahanan keamanan rakyat Semesta"* Padang, 1977. hal:24

²*Majalah Wanita Muslimah*, Topik "Perempuan & Perang", edisi 11 September 2002. Hal: 5.

³Mestika Zed. *Sumatera Barat di panggung sejarah 1945-1950* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.1998) hal.161

pusat)⁴. Ada peluang bagi mereka mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis bila berhadapan dengan APRI dan masyarakat sipil yang memihak pusat⁵. Sedangkan perbedaan yang dialami oleh isteri-isteri TNI Mantan PRRI adalah dampak psikologis (penghinaan).

Anggota PRRI itu terdiri dari dua macam, *pertama* yang disebut sebagai pemberontak yaitu berasal dari anggota TNI atau lebih dikenal dengan tentara regular PRRI⁶, *kedua* disebut sebagai gerombolan berasal dari organisasi-organisasi pemuda (seperti pasukan Tarok, Organisasi Gumarang, dan lain-lain), pelajar, dan mahasiswa, atau lebih dikenal dengan tentara sukarelawan⁷. Dalam hal ini penulis meneliti tentang isteri-isteri tentara regular Transmigran Angkatan Darat Kabupaten Pesisir Selatan Mantan PRRI, yang pada masa PRRI suami mereka melakukan perang gerilya di dalam hutan melawan tentara pusat. Pada masa PRRI secara hukum suami mereka melanggar disiplin TNI untuk mendukung PRRI, sehingga semua hak-hak TNInya dihentikan oleh pemerintahan pusat selama pergolakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pada waktu pergolakan PRRI terjadi tentara regular PRRI masih berpakaian seragam TNI-AD, menggunakan senjata, dan menggunakan fasilitas TNI lainnya⁸. Pemerintah pusat

⁴Wawancara Hj. Ratna Dewi, di Belimbing, Padang. Pada tanggal 7 februari 2010. Lihat juga situs <http://group/RantauNet/web>.

⁵<http://group/RantauNet/web>. Dalam situs tersebut, Reni Nuryanti pernah mewawancarai beberapa saksi dan menceritakan kekerasan yang dilakukan OPR maupun APRI di beberapa wilayah Sumbar. Seperti di daerah Solok, APRI menempati rumah-rumah isteri tentara PRRI. Di Sumpur Kudus muncul istilah ganja batu atau ganja kayu, perempuan tidak dinikahi tentara pusat tetapi malah ditinggal setelah peristiwa PRRI. Di Bukit Agam, seorang perempuan mengaku pernah setres karena ditahan bermalam-malam oleh OPR.

⁶Mestika Zed, Hasril Chaniago. *Pelawanan Seorang Pejuang (Biografi Ahmad Husein)*. (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.2001) hal: 322. Mereka merupakan pasukan inti PRRI warisan perang kemerdekaan dan sisa Divisi Banteng yang tergabung dalam Korp KDMST.

⁷Wawancara M. Ali 83 th. Pangkat SERMA. Tanggal 4 oktober 2009, di Transad Pessel . Pada masa PRRI beliau memihak pusat (APRI)dan bertugas di Batalyon 140 Bukittinggi.

⁸Wawancara H. Anas Ayub 83 th. Tanggal 3 oktober 2009, di Belimbing (Padang). Pada masa PRRI beliau bertugas sebagai Komandan Batalyon Kuranji.

menyebutnya sebagai “pemberontak”⁹ yang memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Setelah peristiwa PRRI berakhir, tepatnya tahun 1961 sebagian mereka kembali ke pangkuan ibu pertiwi setelah menjalani prosedur dari kesatuan masing-masing dan kembali menerima haknya sebagai TNI-AD¹⁰.

Perbedaan antara isteri prajurit dengan isteri TNI biasa terlihat dari peran mereka, dimana Isteri prajurit sebagai pendamping suami pada umumnya sama dengan peran isteri dalam kehidupan masyarakat biasa, bedanya para isteri tersebut adalah sebagai isteri prajurit TNI-AD patuh kepada Kesatuan dan berhak menerima hak-hak TNInya. Setiap prajurit TNI dituntut untuk memiliki nilai kepejuangan dan profesionalisme yang tinggi lebih mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan keluarga¹¹. Begitu juga selama peristiwa PRRI bergolak, isteri-isteri APRI¹² yang mendukung pemerintah pusat. Mereka menerima hak-hak sebagai isteri TNI pada umumnya seperti; mendapatkan gaji yang cukup, tinggal di Batalyon / asrama TNI yang keamanannya terjamin, tidak pernah dapat perlakuan kasar dari anggota PRRI, ke pasar selalu dikawal oleh anggota TNI-AD dengan menggunakan

⁹ Pemberontakan merupakan suatu aksi atau perbuatan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pemberontakan sebenarnya adalah salah satu bagian dari bentuk gerakan penentangan rakyat terhadap pemerintah. Sikap penentangan itu sendiri adalah muara dari ketidak puasan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka mengalami keresahan karena terancamnya kelangsungan hidup. Hal ini menyebabkan mereka berusaha melepaskan diri dari keterjepitan tersebut. Mereka melakukan semacam koreksi atau protes terhadap perlakuan tidak adil yang telah diterimanya dari golongan yang lebih dominan, baik dari kekuasaannya maupun dari materinya. Syamdani, *PRRI: Pemberontakan atau Bukan*. Jakarta: Media Pressindo. 2002. hal: 92-94.

¹⁰ Presiden Soekarno mengumumkan amnesti dan abolisi umum untuk semua yang terlibat PRRI/Permesta, mereka diterima kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan beberapa kondisi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Ketentuan ini berlaku bagi para perwira bawahan dan prajurit. Mestika Zed, Hasril Chaniago. *Pelawanan Seorang Pejuang (Biografi Ahmad Husein)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001. hal. 372

¹¹ *Majalah Kartika Kencana*, edisi 71.1995. hal: 5.

¹² Yang dimaksud APRI disini adalah anggota TNI-AD yang kesatuannya mendukung pemerintahan pusat dan ikut memerangi anggota PRRI. Bukan anggota TNI-AD yang dikirim dari pusat (Jakarta), melainkan mereka sudah berada di wilayah Sumatera Barat sebelum dan sesudah peristiwa PRRI terjadi.

mobil khusus dari Kesatuan, keluarga mereka aman, dan kenaikan pangkat suami menjadi lancar karena mereka tidak terlibat sebagai pemberontak¹³.

Berbeda dengan fenomena di atas, kehidupan yang dialami oleh isteri-isteri tentara regular yang mendukung PRRI selama peristiwa PRRI bergolak. Mereka harus bertahan hidup dengan kondisi seadanya di dalam hutan selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pulalah mereka tidak mendapatkan gaji dari pemerintah¹⁴. Untuk bertahan hidup selama berada di dalam hutan, mereka mengandalkan pemberian dari penduduk sekitar berupa beras, garam, dan minyak. Sebagian mereka ada yang bertugas sebagai mata-mata di dalam kampung sambil bekerja ke ladang-ladang orang, dan menyamar sebagai penduduk kampung untuk meminta-minta beras¹⁵. Dengan kondisi hidup seperti ini, mereka harus membesarkan anak-anak di dalam hutan dan ada juga diantara mereka yang melakukan persalinan (melahirkan) di hutan tanpa ada pertolongan medis¹⁶.

Selama pergolakan PRRI, mereka mendapatkan peran ganda sebagai seorang isteri. Selain sebagai isteri yang membesarkan dan mendidik anak, mereka juga harus menggantikan posisi suami dalam keluarga dengan mencari nafkah sendiri dan menerima segala macam bentuk intimidasi dan terror dari pihak yang mendukung pemerintahan pusat. Seharusnya hal ini ditujukan untuk suami mereka. Penderitaan

¹³Wawancara Rubinah 79 th. Tanggal 9 oktober 2009, di Pesisir Selatan. Pada masa PRRI suaminya memihak pemerintahan pusat (APRI) dan tinggal di Batalyon 140 Bukittinggi, dibawah komando Mayor Nurmatias.

¹⁴Wawancara Samsiarius 71 th, Pesisir Selatan, Tanggal 7 februari 2010

¹⁵Wawancara Nurkaya 73 th, Padang, Tanggal 2 Maret 2010

¹⁶Wawancara Zuraida 78 th, Pesisir Selatan, Tanggal 6 februari 2010

mereka tidak sampai di situ, diantara mereka ada yang suaminya tidak pernah mendapatkan gaji setelah peristiwa PRRI selesai¹⁷.

Pengalaman-pengalaman inilah yang dialami oleh isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI Kabupaten Pesisir Selatan. Mereka mengalami kisah berbeda-beda dan pahit dalam menghadapi peristiwa PRRI. Pada tahun 1971, masing-masing mereka bermukim di daerah Transmigrasi Angkatan Darat Kabupaten Pesisir Selatan mereka mendapatkan berupa 2,5 Ha tanah dan satu unit rumah. Sampai saat ini mereka tinggal di daerah tersebut dan berbaur dengan para pensiunan TNI-AD lainnya, tidak terkecuali dengan pensiunan TNI Mantan Tentara pusat yang pernah menjadi musuhnya masa pergolakan. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena pada masa PRRI mereka dianggap sebagai pemberontak yang memecah belah persatuan Republik Indonesia dan seolah-olah kesalahan mereka tidak dapat dimaafkan. Setelah peristiwa itu berakhir masing-masing mereka bermukim di daerah Transmigrasi Angkatan Darat Kabupaten Pesisir Selatan yang mereka dapatkan dengan cuma-cuma.

Sebelumnya tulisan yang membahas mengenai dampak peristiwa PRRI khusus bagi perempuan di Sumatera Barat ditulis oleh Reni Nuryanti dalam tesisnya yang berjudul "*Kehidupan perempuan di Minangkabau pada masa PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) 1958-1961*"¹⁸, dalam kajiannya menjelaskan secara tuntas kehidupan perempuan Minangkabau selama perang saudara PRRI dan intimidasi yang mereka alami, yang selama ini luput dalam penulisan sejarah.

¹⁷ Wawancara Hj. Ratna Dewi, Padang tanggal 7 februari 2010.

¹⁸ Reni Nuryanti, 2009. *Kehidupan Perempuan di Minangkabau Pada Masa PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) 1958-1961*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta; Program S2 Universitas Gajah Mada.

Pada hakekatnya semua karya dari para sejarawan dan penulis tersebut, sangat membantu dan menunjang dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, walaupun kajian khususnya berbeda. Di sini penulis lebih menitik beratkan pada pengalaman psikologis isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI (1958-1971). Tulisan ini membatasi pada ruang lingkup yang lebih kecil yaitu isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI yang memberikan informasi dan fakta yang berbeda dari tulisan-tulisan yang telah ditulis sebelumnya. Dalam hal ini isteri-isteri TNI Mantan PRRI merupakan saksi kunci dalam sebuah peristiwa untuk memperkuat fakta selama ini tentang peristiwa PRRI.

Peristiwa PRRI ini menyimpan banyak kisah dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh isteri-isteri TNI-AD Mantan PRRI. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengalaman psikologis Isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI (1958-1971) dengan alasan : (1) Banyak studi-studi yang membahas tentang PRRI mulai dari latar belakang peristiwa PRRI, dampak dari peristiwa PRRI, strategi perang dalam penumpasan PRRI, politik kekuasaan, dan keterlibatan pihak asing dalam PRRI. Penelitian ini berusaha mengkaji akibat yang ditimbulkan oleh PRRI dari sudut pengalaman isteri-isteri TNI-AD Mantan PRRI Transmigrasi Angkatan Darat yang secara langsung ikut merasakan dan mengalami peristiwa PRRI. (2) Selama ini studi-studi yang membahas tentang sejarah perempuan sangat langka diteliti. Pengalaman perempuan pada masa perang khususnya isteri-isteri TNI-AD Mantan PRRI jarang diungkapkan dan hanya menjadi catatan kecil dalam sejarah. Mereka bisa menjadi saksi kunci dalam peristiwa PRRI yang menyimpan banyak kisah ini. (3) Isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI pada masa PRRI mereka disebut pemberontak dan mengalami beban psikologis. Pada tahun 1971 mereka menempati

Transmigrasi Angkatan Darat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan satu unit rumah dan 2,5 Ha tanah secara cuma-cuma. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih jauh lagi. Sejauh yang penulis ketahui, belum ada tulisan yang membahas tentang pengalaman psikologis isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI (1958-1971).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini lebih terfokus pada Pengalaman psikologis isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI (1958-1971). Sebagai ciri khas penulisan sejarah, maka penulisan ini dibatasi oleh batasan ruang dan waktu. Adapun batasan ruang lingkup penelitian ini adalah daerah Transmigrasi Angkatan Darat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian batasan waktu penulis tinjau adalah pada tahun 1958-1971. Pada tahun 1958 tepatnya tanggal 15 Februari 1958 sebagai batasan awal karena Ahmad Husein atas nama Dewan Perjuangan mengumumkan berdirinya “Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)” . Pada tahun 1971 para pensiunan TNI menempati daerah Transmigrasi Angkatan Darat yang dikelola oleh Kodam III 17 Agustus Bagian Bimbingan Transad (BABIN TRANSAD).

Untuk lebih mengarahkan kepada pokok permasalahan dari penulisan ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengalaman psikologis yang dialami oleh isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI dalam menghadapi peristiwa PRRI di Sumatera Barat ?

2. Bagaimana kehidupan isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI setelah menempati Transmigrasi Angkatan Darat Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 1971?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan pengalaman psikologis isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI (1958-1971) khususnya :

1. Pengalaman psikologis yang dialami oleh Isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI dalam menghadapi peristiwa PRRI di Sumatera Barat.
2. Kehidupan isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI pasca PRRI.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang pengalaman psikologis isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI (1958-1971) adalah:

a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan pengetahuan akademis bagi mahasiswa tentang perspektif dalam penulisan sejarah perang dan sejarah wanita dengan menggali pengalaman-pengalaman perempuan dalam hal ini khususnya isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI di Kabupaten Pesisir Selatan.

- 2) Sebagai bahan informasi tambahan untuk memperkaya literatur kepustakaan di bidang sejarah pergolakan PRRI khususnya pengalaman isteri-isteri TNI-AD Mantan PRRI.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis sendiri untuk memperluas dan memperdalam pemahaman pengetahuan tentang pengalaman psikologis isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi berbagai pihak dalam memperhatikan kesejahteraan isteri-isteri TNI-AD Mantan PRRI khususnya isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI.

D. Tinjauan pustaka

1. Studi Relevan

Mengingat begitu banyaknya kajian relevan yang berbicara tentang PRRI, maka untuk kepentingan penulisan hanya beberapa saja yang dapat diuraikan. R.Z.Leirissa, dalam bukunya *PRRI-Permesta; strategi membangun Indonesia tanpa Komunis*, mendeskripsikan bagaimana persepsi para eksponen PRRI-Permesta mengenai tanah air pada tahun 1950an. Pokok penting yang ia tulis adalah bagaimana upaya para ekponen PRRI-Permesta dalam menyusun strategi pembangunan berkala nasional, tanpa keterlibatan PKI dalam kegiatan politik nasional¹⁹.

Literatur lainnya adalah karya Audrey Kahin dan George Me.Turnan Kahin yang berjudul *Subversi sebagai kebijakan politik; menyikapi keterlibatan CIA di Indonesia*. Buku ini membahas tentang kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh oleh

¹⁹ R.Z. Leirissa, *PRRI PERMESTA Strategi membangun Indonesia tanpa Komunis*. Jakarta : Grafiti. 1991.

Amerika Serikat untuk melawan dominasi Komunis di Indonesia. Kebijakan politik yang diambil oleh AS secara garis besar adalah membantu pemberontakan dalam bentuk bantuan senjata dan mempersiapkan militer dengan alasan untuk mengamankan warga Negara dan instansi vital mereka yang ada di Indonesia pada tahun 1958 dari sudut pandang politik dunia²⁰.

Selain itu, Syamdani menulis buku yang berjudul “*PRRI: Pemberontak atau Penghianat Negara?*”²¹ yang membahas bahwa PRRI tidak layak disebut sebagai pemberontak atau penghianat Negara. Karena yang dilakukan rakyat Sumatera Barat pada tahun 1958-1961, merupakan wujud kekecewaan terhadap pemerintah yang berkuasa pada saat itu yang terlalu memaksakan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Minangkabau, yaitu masyarakat yang egaliter, rasional, demokratis.

Mestika Zed dalam *Sumatera Barat di panggung sejarah* menyatakan era PRRI sampai pemberontakan G30 S (gerakan tiga puluh september). Bagi masyarakat Sumbar khususnya masyarakat minangkabau merupakan periode sejarah yang penuh benturan, baik yang bersifat fisik maupun mental. Peristiwa PRRI yang digerakkan oleh kekuatan anti-PKI bukan saja telah menyulut perang saudara tetapi juga memberikan peluang yang besar bagi PKI untuk meluaskan pengaruhnya di dalam masyarakat. Akibatnya timbul tekanan politis yang menyebabkan timbulnya krisis dalam masyarakat minangkabau, yang dikenal dengan trauma PRRI²².

²⁰ Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin. *Subversi sebagai politik luar negeri; menyikap keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

²¹ Syamdani, *PRRI: Pemberontak atau Bukan*. (Media Pressindo: Jakarta. 2009).

²² Mestika Zed, dkk. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1999*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1998.

Selain literatur buku-buku tersebut, ada juga beberapa tulisan yang berbentuk skripsi dan makalah antara lain; Syaflison dalam skripsinya yang berjudul “*kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar masa PRRI (1958-1961)*”²³, yang mengungkapkan tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah datar yang tidak baik masa PRRI dan peristiwa ini berdampak buruk sekali bagi mereka. Weftriyawati dalam skripsinya yang berjudul “*Konflik sosial di Kayutanam masa PRRI*”²⁴, kajian ini melihat konflik- konflik yang terjadi di Kayutanam pada masa PRRI yang mana memihak pemerintahan pusat dan memihak PRRI. Kritik daerah terhadap pemerintah pusat melahirkan gerakan-gerakan di Sumatera Tengah dikenal dengan PRRI, dan masyarakat Kayutanam pada umumnya mendukung PRRI. Hal ini terlihat dari dukungan yang diberikan oleh masyarakat selama terjadi peristiwa tersebut. Penumpasan PRRI yang dilakukan oleh tentara pusat membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat Kayutanam.

Bambang HP dalam makalahnya yang berjudul “*Pergolakan PRRI dan dampaknya terhadap merantaunya masyarakat Minangkabau*”²⁵. Dalam hal ini peristiwa PRRI dan segala akibat yang ditimbulkan, seperti kekerasan dan ketakutan berdampak pada psikologi masyarakat Minangkabau sehingga melatar belakangi mereka untuk merantau. Lalu dalam skripsi Mursal.Y yang berjudul “*Konflik sosial di Nagari Lasi periode PRRI (1958-1965)*”²⁶ menyimpulkan bahwa peristiwa PRRI tersebut telah menyuburkan konflik yang selama ini terpendam dalam kehidupan

²³ Syaflison, *Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar masa PRRI (1958-1961)*. STIKIP PGRI Padang, 2009.

²⁴ Weftriyawati, *Konflik sosial di Kayutanam masa PRRI*. UNP: Padang. 2004.

²⁵ Bambang, *Pergolakan PRRI dan dampaknya terhadap merantaunya masyarakat Minangkabau*. Makalah. UNP: Padang. 1997

²⁶ Mursal Y, *Konflik sosial di Nagari Lasi periode PRRI (1958-1965)*. UNP: Padang, 1993.

masyarakat Nagari Lasi serta melahirkan konflik-konflik baru dalam masyarakat tersebut.

David hardi menulis skripsi yang berjudul “*Potret kehidupan seorang pejuang kemerdekaan dan PRRI: Biografi M. Rasyid Rajo Bungsu (1943-1961)*”²⁷ membahas kehidupan M.Rasyid Rajo Bungsu yang berjuang dalam tiga zaman. Yulia Susanti membahas tentang “*Dampak pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) bagi masyarakat Taram Kab.50 koto Sumatera Barat(1958-1966)*”²⁸ menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan PRRI bagi masyarakat Taram sangat buruk, salah satunya berdampak pada merantaunya masyarakat Taram karena dianggap sebagai pemberontak.

Ini merupakan sebagian dari sekian banyak buku dan skripsi yang membahas mengenai peristiwa PRRI dan diantara buku-buku tersebut belum ada yang menulis bagaimana pengalaman psikologis isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI (1958-1971).

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Psikologi

Konsep psikologi adalah sesuatu yang dipelajari dengan berbagai arah dan menyangkut tentang tingkah laku manusia dalam lingkungan sekitarnya melalui pengalaman-pengalaman yang dialami. Konsep psikologi meliputi pengertian psikologi, hubungan psikologi dengan ilmu lain, sejarah psikologi dan psikologi sebagai ilmu otonom serta aliran-aliran dalam individu.

²⁷David Hardi, *Potret kehidupan seorang pejuang kemerdekaan & PRRI Biografi M.Rasyid Rajo Bungsu (1943-1961)*. Unand, 2005.

²⁸Yuliana Susanti, *Dampak pemberontakan PRRI bagi masyarakat Taram kab. 50 Koto Sumbar (1958-1966).Skripsi*. Unand, 2005.

Psikologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Psyche yang berarti jiwa dan kata Logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan manusia. Di samping psikologi mempelajari ilmu tentang kejiwaan, psikologi juga mempelajari tentang pikiran, akan tetapi dalam perkembangannya psikologi menjadi mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam lingkungan hidupnya. Dalam perkembangannya ilmu jiwa belum tentu psikologi namun yang dinamakan psikologi pasti merupakan ilmu jiwa. Jiwa pada manusia bersifat abstrak, maka untuk mempelajari jiwa seseorang secara obyektif merupakan sesuatu yang sangat sulit. Seseorang dapat mempelajari atau mengetahui jiwa pada seseorang dapat dilihat dari pola perilaku seseorang tersebut karena tingkah laku seseorang dapat mencerminkan kejiwaan pada seseorang²⁹.

b. Dampak Psikologis

Dalam sistem masyarakat patriarkhi, perempuan ditempatkan sebagai “kelas nomor dua” setelah laki-laki. Akibat kedudukannya yang ter-subordinasi tersebut, perempuan seringkali mengalami ketidakadilan gender berupa tindak kekerasan baik secara fisik (pemukulan, penganiayaan), psikologis (penghinaan), seksual (perkosaan, pelecehan) maupun ekonomi (ketergantungan istri terhadap suami dalam ekonomi). Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan mengindikasikan belum efektifnya bentuk-bentuk perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan sering berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat.

²⁹ <http://Kompas.com/Kompas cetak/0707/30/swara/3723/2/.htm>

c. Konsep PRRI

Mengenai konsep PRRI, telah banyak sumber yang membicarakan tentang PRRI. Salah satunya adalah pidato Sjafruddin Prawiranegara pada tanggal 15 Februari 1958 menyatakan ;

“PRRI adalah hasil pemikiran dan tjita-tjita orang banyak. Ia tumbuh sebagai sebuah dari pengalaman jang pahit, jang dirasakan sejak kita mentjapai pengakuan kemerdekaan dan sedjak kita berusaha untuk memberi isi terhadap kemerdekaan itu”³⁰

Senada dengan pernyataan Sjafruddin tersebut, Leirissa juga mengatakan bahwa ; “PRRI merupakan suatu usaha untuk menggalang kesatuan di antara berbagai kelompok dalam bangsa Indonesia yang menolak konsepsi Presiden Soekarno dan pengaruh Komunisme dalam Negara dan Bangsa Indonesia”. Lebih lanjut berbicara tentang PRRI. Mulai dari Sejarahwan luar maupun dalam negeri, seperti Barbara, Kahin dan Kahin, Riklefs, sampai Leirissa dan Mestika Zed, dalam karya-karya mereka sering membandingkan PRRI dengan pemberontakan. Namun tentu saja PRRI jangan dilihat hanya dari satu sisi saja.

Para tentara PRRI yang terlibat penentangan terhadap pemerintahan pusat mempunyai pandangan bahwa PRRI hanyalah merupakan koreksi Nasional yang disikapi miring oleh Pemerintah pusat. Syamdani dalam *Skripsi*-nya secara khusus mengkaji PRRI apakah sebuah Pemberontakan atau Pergolakan. Bahkan sampai pada kesimpulan bahwa PRRI bukan pemberontakan tapi sebuah pergolakan. Akan tetapi, kerana belun adanya penulisan standar yang menyatakan PRRI sebuah pergolakan, maka penulis mengatakan kedua istilah ini dalam penulisan. Ventje Samual dalam wawancara eksklusif yang dilakukan oleh LKSI (Lembaga Kajian Sejarah Indonesia),

³⁰Sjafruddin Prawiranegara. 15 Februari 1958. *Pidato Perdana Menteri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia*. Naskah.

secara tegas mengatakan ; “Memberontak terhadap ketidak adilan itu sama dengan berjuang menegakkan keadilan. Kalau untuk keadilan dan kebenaran, saya bangga jadi Pemberontak”³¹.

d. Polarisasi dalam PRRI

Polarisasi dalam PRRI menurut Mestika Zed yaitu ; *pertama*, pengikut fanatik yaitu berasal dari masyarakat Sumatera Tengah, baik dari kalangan pimpinan militer, pejabat sipil, kaum politisi, dan anggota masyarakat dari berbagai lapisan, yang sejak semula mendukung Dewan Banteng dan ketika PRRI terbentuk mereka tetap setia berada di belakangnya dengan beberapa pengecualian. *Kedua*, sikap ganda yaitu mendukung PRRI dan mendukung pemerintah pusat. *Ketiga*, tidak jelas sikapnya baik kepada PRRI maupun ke Jakarta, yaitu faksi militer yang berada di wilayah Sumatera Selatan seperti Barlian. *Keempat*, anti PRRI yaitu mereka yang sejak semula tidak menyetujui tuntutan daerah bergolak dan menganggap ultimatum itu sebagai tindakan yang tidak bijaksana karena terlalu blak-blakan dan tidak kenal kompromi. Beberapa orang perwira Dewan Banteng yang tidak mendukung keputusan untuk membentuk PRRI yaitu seperti ; Mayor Nurmatias Komandan Batalyon 140 Bukittinggi, Mayor Djohan Komandan Batalyon 141 di Padang Panjang, dan Mayor Iskandar Martawijaya Komandan Batalyon 142 di Painan, dan Kepala Kepolisian Sumatera Tengah, Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa³².

Isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Kabupaten Pesisir Selatan Mantan PRRI yang penulis teliti ini adalah suami mereka pengikut fanatik yang sejak semula Kesatuan dan Komandannya mendukung Dewan Banteng, dan ketika PRRI terbentuk

³¹ Dokumentasi *Wawancara* eksklusif dengan Ventje Samual, koleksi LKSI. 2007.

³² Mestika Zed, Hasril Chaniago. *Pelawanan Seorang Pejuang (Biografi Ahmad Husein)*. (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.2001) hal. 293-294

mereka tetap setia berada di belakang. Mereka bergerilya dan melakukan serangan dari dalam hutan untuk melawan tentara pusat.

E. Metode Penelitian

Mengikuti penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah yang bersifat deskriptif. Sesuai dengan kaidah penelitian sejarah, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu ; *pertama*, heuristik yaitu mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder yang dianggap relevan dan berhubungan dengan Isteri-isteri TNI-AD Mantan PRRI. Data primer diperoleh dengan cara terjun kelapangan mencari sumber-sumber primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui wawancara yang dilakukan dengan isteri-isteri Transmigrasi Angkatan Darat Mantan PRRI. Orang-orang yang terkait dengan Isteri-isteri tersebut, seperti anggota keluarga yaitu anak, saudara-saudaranya, sahabat, rekan sesama mengalami peristiwa PRRI, bahkan tetangganya. Diantara informan-informan tersebut diambil orang-orang yang bisa menjelaskan serta mengungkapkan kehidupan Isteri-isteri TNI-AD Mantan PRRI.

Metode wawancara yang digunakan yaitu melalui teknik wawancara tidak berstruktur atau wawancara mendalam yang dilakukan melalui wawancara yang terarah dan wawancara tidak terarah. Melalui wawancara terarah, penulis mempersiapkan pedoman wawancara agar persoalan-persoalan yang diungkapkan sesuai dengan fokus studi. Sementara wawancara tidak terarah dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung data hasil wawancara terarah. Agar data yang diperoleh lebih akurat dan tajam, penulis melakukan wawancara sambil lalu atau wawancara yang dilakukan secara informal. Karena Isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI yang

diteliti masih hidup, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada masing-masing isteri untuk mendengar sendiri bagaimana ungkapan pengalaman Isteri-isteri TNI-AD PRRI terhadap dirinya sendiri.

Data primer juga diperoleh melalui dokumentasi berupa foto-foto pribadi, arsip-arsip, terutama arsip pribadi Isteri-isteri TNI-AD Mantan PRRI dan arsip suaminya. Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara³³. Sementara data sekunder, diperoleh melalui studi pustaka yang dilakukan pada beberapa pustaka, seperti perpustakaan UNP, perpustakaan FIS, perpustakaan Sejarah, perpustakaan UNAND, dan perpustakaan lainnya yang menyediakan bahan-bahan seperti buku-buku yang menunjang penelitian ini.

Kedua, kritik sumber yang dilakukan melalui dua cara yakni eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk pengujian terhadap keaslian (otentitas) data yang diperoleh dari lapangan baik data hasil wawancara maupun data arsip. Informan yang diwawancarai adalah benar-benar orang yang dapat dipercaya dan mengetahui kehidupan sang tokoh. Sementara data arsip, keaslian sumber akan dilihat terutama sisi luar sumber bentuk tulisan tangan, stensilan atau dalam bentuk lainnya.

Selanjutnya, kritik internal bertujuan mengkaji kebenaran dan keabsahan isi data³⁴ yang dilakukan melalui uji kredibilitas. Penulis mengadakan observasi secara intensif terhadap subjek penelitian agar data yang diperoleh bisa semakin wajar dan apa adanya serta lebih mendalam sesuai dengan fokus studi. Untuk menjamin kesahihan data, digunakan *Teknik Trigulasi Data* yaitu dengan cara membandingkan data hasil

³³Arief Furqan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005), hal; 54

³⁴Azmi Fitrisia, dkk, *Panduan Penulisan Penulisan Proposal dan Skripsi Sejarah*, (Jurusan Sejarah: UNP, 2003), hal 4

pengamatan dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi, dan data hasil pengamatan dengan data dokumentasi³⁵.

Dengan menggunakan teknik *trigulasi data*, penulis mengajukan pertanyaan yang sama pada orang yang sama dalam waktu yang berbeda, dan mengajukan pertanyaan yang berbeda-beda pada orang yang sama. Melalui kegiatan tersebut, kesaksian data yang diberikan para informan benar-benar dapat diandalkan (realible). Sementara data arsip diuji dengan melihat apakah arsip benar-benar bisa dijadikan sumber. Dengan demikian, perlu diketahui siapakah atau lembaga manakah yang membuat dokumen tersebut. Apakah itu dokumen pribadi, dokumen pemerintah atau dokumen dari lembaga lainnya.

Ketiga, analisis dan interpretasi. Pada tahap ini dilakukan penggabungan sumber-sumber yang se-tema atau se-sub tema dan kegiatan yang membandingkan serta kegiatan menghubungkan berbagai jenis bahan yang dikumpulkan³⁶. Berkaitan dengan itu data-data yang berkaitan dengan Istri-istri TNI-AD Mantan PRRI yang diperoleh di lapangan baik itu studi kepustakaan, data dokumentasi maupun data hasil wawancara, diurutkan dan diklasifikasikan serta dianalisa dan dirangkai berdasarkan hubungan sebab akibat sesuai dengan pengelompokkan yang telah ditentukan. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh benar-benar data yang dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk merekonstruksi cerita pengalaman psikologis Istri-istri Transmigran Angkatan Darat Mantan PRRI.

Keempat adalah tahap penulisan sejarah, dimana data yang telah diuji kebenarannya itu dirangkai dan dihubungkan dengan konsep dan teori yang

³⁵Arief Furqan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh*,(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005), hal; 56

³⁶Azmi Fitrisia, dkk, *Panduan Penulisan Penulisan Proposal dan Skripsi Sejarah*, (Jurusan Sejarah: UNP, 2003), hal 4

dikemukakan. Setelah didapatkan fakta sejarah yang akurat maka dilakukan penulisan sejarah dalam bentuk skripsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERISTIWA PRRI DI SUMATERA BARAT

A. Pergolakan Daerah di Sumatera Barat

1. Latar Belakang Pergolakan.

Suasana politik, pemerintahan, ekonomi, sosial yang kacau, menjadi pemicu timbulnya ketidak puasan daerah-daerah luar jawa. Sejak usai perang kemerdekaan, pemerintahan dijalankan secara sentralistik baik di bidang politik, ekonomi, dan pembangunan. Sentralisasi di bidang politik pada awalnya mungkin dapat diterima oleh daerah-daerah luar jawa. Karena mereka memahami pemerintah nasional masih memerlukan waktu untuk menata sistem politik dan pemerintahannya. Tetapi sentralisasi di bidang ekonomi dan pembangunan sangat menyentuh rasa ketidak adilan rakyat yang sebelumnya telah sama-sama berjuang menegakkan kemerdekaan. Pemerintah nasional sepertinya melupakan pembangunan daerah kususnya daerah di luar Jawa, padahal sebagian dana dari devisa dan pajak dikumpulkan pemerintah dari daerah luar Jawa khususnya Sumatera³⁷.

Perasaan kecewa masyarakat semakin meningkat pada tahun 1950 ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang calon Gubernur Sumatera Tengah. Empat calon Gubernur yang dikirim oleh DPRST kepada pusat yang terdiri dari Ilyas Jakoeb, dr. M.Jamil, dr.A.Rahim Usman dan Mr.St.Mohammad Rasyid, dari empat calon Gubernur yang direkomendasikan DPRST tersebut tidak satupun diterima pusat. pememerintah pusat memilih jalan mereka sendiri dengan mengirim Roeslan Mulyo

³⁷Mestika Zed & Hasril Chaniago. *Perlawanan Seorang Pejuang (Biografi Ahmad Husein)*. Jakarta Pustaka Sinar harapan. 2001.hal: 152.

Hardjo sebagai Gubernur Sumatera Tengah. DPRST menolak pengangkatan tersebut dengan mengembalikan keputusan Menteri Dalam Negeri³⁸.

Dalam bidang politik, babak baru persetujuan antara DPRST dengan Kementrian Dalam Negeri pun dimulai dengan adanya penolakan tersebut. Pemerintah menganggap langkah DPRST sebagai sebuah pembangkangan. Melalui peraturan pemerintah No.1 tanggal 15 Januari 1951 secara resmi DPRST dibekukan. Pembekuan itu adalah pembekuan sebuah lembaga legeslatif daerah yang pertama dan satu-satunya yang pernah dilakukan oleh pemerintahan pusat di Indonesia. Setelah pembekuan itu, Roeslan dapat duduk di kursi Gubernur Sumatera Tengah. Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri menghapuskan keberadaan DPRST berakibat kepada hilangnya alat perlengkapan Demokrasi. Kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan budaya Minang yang menganut Demokrasi.

Ketimpangan dibidang ekonomi terlihat jelas dalam pembangunan yang sentralistik, padahal 60% devisa berasal dari daerah. Janji-janji kehidupan yang lebih layak setelah kemerdekaan hanya menjadi angan-angan rakyat yang tidak terealisasikan. Jika diibaratkan kemerdekaan itu adalah kue, remah-remahnya pun tidak bisa mencicipi. Kemerdekaan itu tidak dinikmati oleh orang-orang yang memperjuangkannya

Faktor lain yang menyebabkan timbulnya pergolakan adalah adanya perkembangan politik di Indonesia. Partai-partai politik yang bermunculan membawa polarisasi yang berbahaya dalam tubuh bangsa Indonesia. Polarisasi ini sudah tampak sejak awal tahun 1950an, tetapi menjadi nyata dalam pemilu 1955. Pada tahun 1948, PKI (Partai Komunis Indonesia) mengadakan pemberontakan di Madiun, tetapi diizinkan mengembangkan sayapnya lagi di Indonesia. Kedudukan PKI ini semakin

³⁸ Mestika Zed, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1950*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1998. hal: 122-123.

sangat kuat yaitu setelah pemilihan umum 1955 yang mendapat tempat menjadi empat partai terbesar setelah Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdatul Ulama (NU), dan Masyumi. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh PKI untuk mempengaruhi dan mendekati PNI dan NU, kemudian mereka berhasil mempengaruhinya³⁹.

Dibidang pemerintahan, pengaruh PKI semakin besar dengan mendekati presiden Soekarno. Keadan ini sangat menguntungkan PKI karena sistem pemerintahan yang parlementer menjadikan presiden dan wakil presiden sebagai simbol saja. Pengaruh PKI dalam pemerintahan ini dimaksudkan agar bisa menguntungkan partainya, supaya kabinet dalam melaksanakan roda pemerintahan berada dalam pengaruh kekuasaannya. Kabinet menjadi kacau setelah dijalankan oleh Ali Sastroamijoyo yang merasakan adanya sentralisasi pemerintah pusat. Sehingga menimbulkan pergolakan daerah akibat adanya ketidak puasan penyelenggaraan pemerintahan waktu itu.

Partai Masyumi yang tidak terpengaruh oleh PKI berjuang untuk memerangi pengaruh dari komunis yang kemudian mendapat dukungan dari M.Hatta yang juga membenci adanya komunis di Indonesia. Sehingga dalam perolakan PRRI akan ditemui banyak dari orang-orang Masyumi yang duduk dalam anggota PRRI. Adanya pengaruh komunis terhadap diri Soekarno membuat daerah luar Jawa tidak senang dengan pemerintah pusat, sehingga mereka memutuskan untuk memerangi pemerintah pusat yang dianggap telah dipegaruhi oleh komunis.

Hal lain yang mempengaruhi ketidak puasan daerah yaitu dengan berkembangnya politik dunia yang tidak terlepas dari dua kekuatan besar antara blok

³⁹R.Z. Leirissa, *PRRI PERMESTA Strategi membangun Indonesia tanpa Komunis*. (Jakarta : Grafiti. 1991)hal: 8.

Barat dengan blok Timur (Komunis) yang kedudukannya sama-sama ingin menanam pengaruh di Indonesia, sehingga menggeret bangsa Indonesia masuk kedalam perang dingin yang sedang berkecamuk⁴⁰. Dalam usaha menanamkan pengaruhnya di Indonesia, maka Amerika Serikat memberikan bantuan pada luar Jawa yang anti terhadap Komunis. Bantuan itu berupa pengiriman senjata yang dipergunakan oleh para pejuang PRRI di Sumatera Barat dan daerah lainnya⁴¹. Oleh karena itu, dengan adanya pengaruh kedua kekuatan besar itu akan menambah konflik yang berkepanjangan di Indonesia.

Rasa ketidak puasan itu juga dialami oleh para prajurit yang ikut dalam perjuangan melawan penjajah. Mereka mendapatkan perlakuan kurang adil terutama kesejahteraan mereka dalam perumahan dan pensiunan beberapa Batalion. Selain itu, alasan lainnya yaitu ketidak cocokkan terhadap pengangkatan A.H.Nasution sebagai KASAD. Karena sebelumnya TNI telah memilih tiga calon untuk menjabat sebagai KASAD yaitu Kolonel Simbolon, Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Zulkifli Lubis. Tetapi keadaan menjadi lain setelah pemerintah pusat mengambil alih sendiri dengan mengangkat KASAD yang tidak mendapat persetujuan dari pemimpin daerah.

Merebaknya teror politik dan ancaman fisik terhadap pemimpin militer daerah bergolak dan para politisi yang mendukung perjuangan daerah, menyebabkan gerakan menentang Soekarno semakin luas sehingga melibatkan para tokoh militer dan sipil dari daerah-daerah luar Jawa terutama Sumatera. Dengan alasan kekecewaan kepada pemerintahan pusat inilah maka Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda,

⁴⁰Sayidiman Suryohadiprojo, *Kepemimpinan ABRI (dalam sejarah dan perjuangannya)*. Jakarta: Intermasa.1996. hal;72.

⁴¹Audrey Kahin, *Subversi sebagai politik luar negeri (menyikap keterlibatan CIA di Indonesia)*. Jakarta : Grafiti Press.1997.

Permesta, kemudian menjadi Dewan Perjuangan, memisahkan diri atau membentuk Negara di luar Republik Indonesia. Mereka menuntut pemulihan lagi Dwitunggal Soekarno-Hatta dalam kepemimpinan Negara, pembenahan kepemimpinan Angkatan Darat, hubungan pusat dan daerah yang berkeadilan, pemberian otonomi daerah, dan pelarangan Komunisme yang anti-Tuhan.

2. Jalannya Pergolakan.

Perkembangan ketidak puasan daerah disebabkan karena kepemimpinan pusat yang sentralisasi dan pengaruh komunis yang dianggap telah mempengaruhi jalannya pemerintahan pusat, serta mengabaikan kepentingan daerah merupakan faktor pendorong jalannya pergolakan. Sehingga tidak ada pilihan lagi bagi daerah luar Jawa untuk membentuk pemerintahan sendiri dan memisahkan diri dari pemerintah pusat.

Sebagai reaksi dari perkembangan daerah kemudian pemerintah pusat mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) dan dilanjutkan Musyawarah Pembangunan (MUNAB) untuk membahas masalah ketidak puasan daerah. Dengan demikian, para pemimpin daerah memilih jalan sendiri dengan memisahkan diri dan memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat. Pada tanggal 20 Desember 1956 muncul Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin Ahmad Husein. Keputusan ini kemudian mendapat dukungan dari para pemimpin daerah yang lain seperti Dewan Gajah di Sumatera Utara (Kolonel Simbolon), Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Kolonel Barlian), Dewan Manguni di Sulawesi (Kolonel Vetdje Samual), dan Dewan-dewan lainnya di daerah yang bergolak.

Menjelang tutup tahun 1957 hingga awal tahun 1958 telah terjadi kebuntuan dialog antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah bergolak. Upaya untuk mencegah meletusnya perang saudara antara daerah luar Jawa dengan pemerintah pusat telah

ditempuh, tetapi upaya tersebut tidak mendapat respon pemerintah pusat. Bahkan hasil Munas sebagai upaya penyelesaian telah dibekukan atas putusan Presiden Soekarno.

Seluruh system politik Indonesia saat itu lebih mengarah kekacauan yang mengakibatkan munculnya Dewan-dewan di Sumatera, Kopermas di Jawa Barat, dan Permesta di Indonesia Timur. Pemerintah pusat telah menghentikan segala perundingan dengan daerah bergolak menyusul terjadinya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Sekolah Cikini pada tahun 1957⁴². Ketegangan meningkat dan tanda-tanda perang saudara semakin kelihatan.

Tindak lanjut dari protes ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, Dewan Perjuangan di Padang menyampaikan “ultimatum”(sebetulnya yang menggunakan istilah ultimatum adalah pihak tentara pusat) kepada pemerintah pusat dengan tuntutan sebagai berikut: 1). Menuntut agar Kabinet Djuanda dibubarkan dalam tempo 5x24 jam dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden, 2). Kemudian Presiden diminta memberi mandat kepada Bung Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX untuk membentuk kabinet baru, 3). Supaya cabinet baru diberi kesempatan sepenuhnya untuk bekerja sampai diadakan pemilu berikutnya, 4). Agar presiden Soekarno/ pejabat presiden membatasi diri menurut konstitusi, 5). Apabila tuntutan diatas tidak dipenuhi, maka Dewan Perjuangan akan mengambil langkah kebijakan sendiri dan menganggap dirinya terbebas dari wajib taat dari Presiden Soekarno sebagai kepala Negara. Selain ditujukan kepada Soekarno, hal ini juga disampaikan kepada Perdana Menteri Djuanda, M.Hatta, Sultan Hamengku Buwono dan ketua parlemen. Pada hari berikutnya kabinet menyiarkan jawaban penolakan lewat radio dan memerintahkan komando daerah militer

⁴²Mestika Zed, *Sumatera barat di panggung sejarah 1945-1950*. Jakarta : Pustaka sinar harapan.1998.hal; 144.

Sumatera dibekukan dan hubungan darat maupun udara dengan Sumatera Tengah dihentikan samasekali⁴³.

Pemerintah dengan tegas menolak ultimatum itu dan membebas tugas perwira-perwira militer yang mendukung aksi tersebut, diantaranya Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel dan Maluddin Simbolon, serta memerintahkan penangkapan atas mereka. Setelah limit waktu ultimatum tidak dipenuhi oleh pusat, pada tanggal 15 Februari 1958 Dewan Perjuangan mengumumkan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Ahmad Husein dibantu oleh tokoh-tokoh nasional seperti Syafruddin Prawiranegara, M.Nasir, Burhanuddin Harahap, dan Soemitro Djoyo Hadikusumo membentuk pemerintahan tandingan dan menunjuk Mr.Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri yang berkedudukan di Padang.

3. Akhir pergolakan.

Meletusnya konflik bersenjata antara kekuatan PRRI dan tentara Soekarno (APRI). Tentara regular PRRI hanya memiliki peralatan perang yang ada, ditambah dengan bantuan Uni Soviet, dan hanya memiliki beberapa Batalion. Tetapi, pasukan pusat dikerahkan ke daerah-daerah bergolak terdiri atas 20.000 pasukan, infanteri khusus, serta bantuan dari AL dan AU. Soekarno yang baru pulang dari Jepang pada tanggal 16 Februari 1958, menyokong langkah Djuanda dan Nasution untuk menghadapi perlawanan PRRI, karena masih memerlukan konsultasi dengan M.Hatta. Hatta masih menaruh harapan bahwa disaat-saat genting itu masih ada jalan untuk mencegah pecahnya perang saudara. Hatta juga mengirim surat kepada Ahmad Husein di Padang, meminta agar menghindari konflik senjata. Namun, surat tersebut tidak

⁴³ Mestika Zed & Hasril Chaniago. *Perlawanan Seorang Pejuang (Biografi Ahmad Husein)*. Jakarta Pustaka Sinar Harapan. 2001.hal:

pernah diterima Ahmad Husein karena kurir yang membawa surat itu tidak pernah sampai ke Padang⁴⁴.

Hatta sebelumnya juga telah berbicara kepada Nasution, supaya jangan mengambil tindakan bersenjata, karena itu bukan jalan keluar. Nasution menolak, karena katanya ia hanya hendak mengejar dan menangkap Ahmad Husein saja serta orang-orang yang telah mempengaruhinya. Hatta mengutuk Ahmad Husein dengan proklamasi PRRInya, tapi Hatta juga mengutuk Nasution dengan langkah perang yang fatal.

Perang gerilya dan tindakan brutal serta pelanggaran HAM oleh Negara, khususnya militer dan aparaturnya keamanan. Pada masa ini terjadinya banyak korban akibat penyalahgunaan wewenang militer, terror, pemerkosa, pembakaran rumah penduduk, sampai pemeriksaan, dan pembunuhan. Lebih tragis lagi, sebegitu banyaknya angkatan muda yang hilang (generasi antara 45 dan 66)⁴⁵.

Perang saudara ini membawa akibat yang buruk secara fisik maupun psikis bagi masyarakat, terutama bagi orang minang. Selain menghancurkan prasarana kehidupan rakyat, hal ini juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Khusus di daerah Operasi Kodam III/17 Agustus (Sumatera Barat/Riau), menelan banyak korban dikedua belah pihak sebanyak 7.146 orang, 1.944 luka, dan 321 orang hilang. Korban terbesar diderita oleh PRRI yaitu sebanyak 6.115 orang dan yang hilang 627 hilang. Sedangkan dari Kodam III/APRI tercatat meninggal sebanyak 1.031, yang terdiri dari tentara 329 orang, polisi/Brimob 56 orang, OPR 67 orang, pegawai 7 orang, dan rakyat 572 orang. Menurut data dari Nasution, korban jiwa sebanyak 22.174 orang, luka-luka

⁴⁴ Marah Joenes.2003. Mr.H.ST.Moh Rasjid, *Perintis kemerdekaan, pejuang tangguh, berani, dan jujur*. Jakarta;PT.Muatiara sumber widya.hal;179.

⁴⁵ Mestika Zed.PRRI,sebuah antiklimaks dari gerakan rakyat menentang rezim otoriter.Makalah disajikan dalam konvensi mahasiswa Sumatera.Padang, 25 Maret 2001.hal;2

4.360, dan ditawan 8.072. Terdiri dari 2.499 tentara, 956 anggota OPR, 274 polisi, dan 5.592 orang sipil.

Pemerintah merintis upaya penyelesaian perang gerilya dan perundingan-perundinganpun dilancarkan secara terpisah antara pimpinan pasukan PRRI dan pihak APRI. Konflik senjata tersebut berakhir secara definitif, setelah H.N.V Samual sebagai pimpinan pasukan PRRI-Permesta menyatakan menyerah tanpa syarat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ahmad Husein dan anggota PRRI Sumatera lainnya. Pemerintah mengeluarkan amnesti dan abolisi bagi mereka yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi melalui Keppres No. 332 tanggal 22 Juni 1961 dan Keppres No.442 tahun 1961 mengatur amnesti dan abolisi secara lebih luas dan mencakup semua pihak yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi⁴⁶.

Amnesti yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka yang terlibat PRRI belumlah mengakhiri beban sebagian besar rakyat di Sumatera Barat. Pemimpin-pemimpin PRRI, militer, dan politisi, untuk beberapa tahun dikarantina di Pulau Jawa. Sementara rakyat, pemuka-pemuka masyarakat, pelajar dan mahasiswa yang terlibat PRRI, harus mengalami situasi dan tekanan hidup yang cukup berat. Berakhirnya PRRI ternyata belum mengakhiri penderitaan rakyat, karena hal ini telah membawa kehancuran yang cukup parah bagi daerah.

Penumpasan PRRI yang dilakukan oleh pemerintah Pusat melalui operasi militer telah memporak-poranda kehidupan sosial politik, ekonomi, dan budaya daerah. Selain itu juga menimbulkan goncangan kultural dalam diri orang Minang yang semula merasa bangga dan percaya diri digantikan oleh perasaan malu, terhina, dan tertekan, karena menjadi pemberontak yang kalah. Kekalahan yang diderita setelah

⁴⁶ R.Z. Leirissa, *PRRI PERMESTA Strategi membangun Indonesia tanpa Komunis*. (Jakarta : Grafiti. 1991) hal:201.

pemberontakan PRRI menyebabkan sebagian besar orang Minangkabau menyembunyikan identitasnya sebagai orang kalah dan ada pula rakyat yang mengganti namanya dengan nama Jawa sebagai wujud ketakutannya terhadap tekanan pemerintah. Bahkan orang Minangkabau yang tidak terlibat pun juga menerima dampak dari peristiwa PRRI ini, seperti yang diceritakan oleh Hasyim Ning;

“Perang yang berlangsung di tanah kelahiran ku menimbulkan banyak akses yang macam-macam terhadap putra daerah Minangkabau yang menetap di Jakarta. Banyak diantara mereka yang ditahan dan diperiksa karena ada sangkaan bahwa mereka pendukung PRRI. ...Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan berbagai persoalan bagi ku. Banyak diantara mereka atau keluarga mereka yang datang pada ku agar mengupayakan perlindungan kerena menurut sangka mereka akan dapat aku laksanakan. Sebaliknya, aku juga terkena ejekan dan senda gurau yang memerehkan telinga ku. Teman-teman yang bersimpati dengan PRRI datang membawa ejekan. Sedangkan teman yang lain datang dengan sendagurau tentang kerosnya perlawanan tentara PRRI yang dipimpin Ahmad Husein”⁴⁷.

Penghinaan yang sangat menyakitkan bagi Masyarakat Minang adalah ketika rumah mereka diberi tanda silang sebagai tanda pemberontak dan keluarga mereka dikucilkan oleh masyarakat lain. Karena adanya rasa takut oleh warga yang lain untuk diperlakukan sama⁴⁸. Akhirnya lengkap sudah penghinaan yang dialami masyarakat Minang yang disebabkan hukum sosial yang dipaksakan oleh pemerintah dibawah todongan senjata. Hal ini juga termasuk pembunuhan karakter terhadap mereka. Akibatnya, terjadi eksodus besar-besaran pada masyarakat Minangkabau ke luar daerah Sumatera Barat.

Kehancuran yang dialami Sumatera Barat akibat pemberontakan PRRI bukan hanya meluluh-lantahkan kehidupan politik dan mental masyarakat, tetapi juga menimbulkan kemiskinan yang merata ditengah masyarakat. Ekonomi masyarakat boleh dikatakan sangat morat-marit, karena selama pemberontakan berlangsung hampir semua

⁴⁷Hasyim Ning, *Pasang surut pengusaha pejuang*. Grafitpres, Jakarta. 1986.

⁴⁸ Syamdani, *PRRI; Pemberontak atau bukan*. MediaPres, Jakarta, 2009.hal;92.

sarana dan prasarana ekonomi hancur. Akibatnya terjadi bermacam-macam krisis dalam masyarakat. Apalagi dengan tidak terkendalinya harga inflasi menimbulkan kepanikan yang luas pada rakyat banyak. Situasi ekonomi daerah dan rakyat pada periode ini memang benar-benar sulit.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti berhenti bergerak. Banyak penduduk Sumatera Barat yang terpaksa makan umbi-umbian, dan bagi yang memiliki sedikit beras, harus memasaknya menjadi bubur agar jumlahnya lebih banyak. Ada yang mencampurnya dengan jagung, jika dapat makan nasi dalam sehari itu sudah untung. Disamping sulit mendapatkan beras, harganya pun tidak terjangkau oleh rakyat. Suasana ini lebih mencakam lagi oleh berkembangnya tingkat kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan kejahatan lainnya karena disebabkan tekanan ekonomi tersebut⁴⁹. Kalupun ada uang ditangan, untuk mendapat kebutuhan pokok seperti beras, minyak tanah, dan kebutuhan pokok lainnya sangat sulit sekali. Setiap keluarga harus antri dengan system penjatahan memakai kupon. Bahkan tidak jarang dropingnya terputus sehingga harganya akan semakin mahal dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat.

Kesulitan ekonomi rakyat Sumatera Barat ini juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam politik keuangan dengan memotong harga uang seribu menjadi satu rupiah pada tahun 1965. Pemotongan uang kertas ini berakibat sangat parah bagi masyarakat, sehingga memberikan tambahan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Tingkat inflasi yang begitu tinggi dan harga pokok yang tidak terkendali⁵⁰.

⁴⁹ Mestika Zed, *Sumatera barat di panggung sejarah 1945-1950*. Jakarta : Pustaka sinar harapan.1998.hal;174-175.

⁵⁰ Mestika Zed,*Ibid*.hal;175.

B. Pengalaman isteri-isteri TNI-AD mantan PRRI pada masa pergolakan.

Semua lapisan masyarakat Sumatera Barat merasakan begitu pahitnya pengalaman hidup selama pergolakan PRRI ini, hal ini memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya mereka. Berbagai pengalaman perang tersebut dirasakan juga oleh Isteri-isteri TNI Mantan PRRI ini, yang pada umumnya suami mereka ikut perang gerilya di hutan. Pengalaman-pengalaman tersebut antara lain:

a. Mengikuti suami masuk hutan.

Pertempuran semakin menjadi-jadi ketika tentara dari Kodam 17 Agustus mendapat bantuan personil tentara pusat. Kondisi keamanan Sumatera Barat menjadi tidak stabil dan mencekam. Lebih dari seribu personil mereka dikerahkan untuk “mengamankan daerah Sumatera Tengah” yang mereka beri nama “Operasi 17 Agustus”. Saat itu masyarakat menjadi panik ketika ribuan tentara pusat menguasai kota⁵¹. Penduduk mulai mengungsi ke daerah yang lebih aman. Rumah-rumah penduduk kosong dan semua kegiatan masyarakat nyaris lumpuh. Pada malam hari, suasana sangat terasa mencekam. Rumah-rumah penduduk gelap gulita dan suasana kampung menjadi sunyi. Pada umumnya saat itu masyarakat mengalami ketakutan yang luar biasa, seperti yang diungkapkan oleh Suryadi⁵²:

“Amak acok bacarito maso PRRI, baliau manyabuiknyo maso peri-peri. Wakatu tu apak alun laia lai. Kalau amak maliek acara TV ado parang-parangnyo, pasti baliau ingek maso PRRI. Amak carito, Maso tu padusi alun manikah jo padusi yang alah manikah pado katakuik'an kalau basobok

⁵¹Makmum Salim. *Sejarah Operasi-Operasi gabungan terhadap PRRI-Permesta*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan pusat sejarah ABRI.1971. hal: 33. Lihat juga situs www.RantauNet.com.

⁵² Wawancara Suryadi umur 45th (lahir tanggal 17 Mai 1965 di Duku) pada tanggal 7 Agustus 2009.

*samo tentara pusek atau tentara jawa. Tentara pusek acok memperkosa anak gadih atau nyo baok ka Jawa. Kalau tentara pusek atau tentara Jawa tiba ke kampung, sado anak gadih manyuruak kadalam rumah.”*⁵³

Ungkapan tersebut menggambarkan bagaimana dasyatnya perang tersebut yang menyisakan trauma khususnya bagi perempuan. Letusan senjata terdengar dimana-mana. Setiap persimpangan jalan raya terdapat tentara pusat lengkap dengan pakaian loreng dan senjata lengkap. Mereka berpatroli untuk menjaga keamanan dari serangan masyarakat yang terlibat PRRI. Hal ini yang menjadi alasan bagi sebagian isteri TNI Mantan PRRI mengikuti suaminya ke dalam hutan. Mereka sangat ketakutan karena hal ini dapat mengancam keselamatan jiwanya dan anak-anak.

Mengikuti suami masuk ke dalam hutan merupakan pilihan yang tepat bagi sebagian isteri saat itu. Mereka terpaksa mengikuti suami, karena mereka tidak ingin mati konyol akibat operasi yang dilakukan tentara pusat. Sebagian mereka takut tinggal bersama keluarga yang masih bertahan di kampung. Mereka menganggap, keamanan mereka dan anak-anak lebih terjamin jika mereka ikut suami. Mereka siap dan dan ikhlas menghadapi semua resiko yang terjadi selama mengikuti suami ke dalam hutan.

Mereka diberangkatkan bersama rombongan kesatuan dari kesatuan masing-masing menggunakan angkutan dari kesatuan menuju ke kampung yang mendukung PRRI. Berbaur dengan pasukan suami saat itu merupakan pengalaman pertama yang mereka rasakan seumur hidup. Secara tidak langsung saat itu mereka merasa sebagai tentara yang siap berjuang demi satu ideologi. Mereka rela berjalan kaki sejauh kurang lebih 20 Km ke dalam hutan dan naik turun bukit. Kondisi yang darurat

⁵³ Ibu sering cerita masa PRRI, dia menyebutnya masa *peri-peri*. Saat itu saya belum lahir. Kalau ibu sering melihat acara TV ada perang-perangnya, pasti beliau ingat masa PRRI. Ibu cerita, masa itu perempuan yang belum menikah atau perempuan yang sudah menikah sangat ketakutan kalau bertemu dengan tentara pusat atau tentara Jawa. Tentara pusat sering memperkosa anak gadis atau mereka bawa ke Jawa. Kalau tentara pusat atau tentara Jawa tiba ke kampung, semua anak gadis sembunyi ke dalam rumah.

mengharuskan mereka untuk menyelamatkan diri dengan membawa anak-anak, menjujung barang, dan sebagian ada dalam kondisi hamil tua.

Setelah sampai di kampung yang mendukung PRRI, pasukan tentara regular PRRI dibagi menjadi beberapa regu. Hal ini bertujuan untuk menjangkau daerah-daerah yang menjadi pos-pos pertahanan mereka dan mempersempit ruang gerak penguasaan wilayah tentara pusat. Satu Komandan sektor mengepalai kurang lebih 2000 anggota tentara regular PRRI. Masing-masing anggota dibagi lagi dalam masing-masing regu yang jumlahnya mencapai delapan hingga dua belas orang.

Setelah berada di tempat tujuan, para isteri TNI mantan PRRI ini mendapat peran tersendiri dalam rombongan. Sebagian mereka ada yang bertugas sebagai mata-mata, bagian perbekalan, dan bagian dapur. Masing-masing mereka memiliki tugas tersendiri. Jika sebagai mata-mata, mereka harus melihat situasi yang terjadi didalam kampung. Jika mereka bertugas sebagai bagian perbekalan, mereka harus meminta-minta bahan pokok keperluan dapur seperti beras, ikan asin, dan garam, kepada penduduk kampung. Aktifitas mereka di dalam kampung mendapat tanggapan positif oleh penduduk kampung. Seperti yang diceritakan Nurkaya sewaktu ia berada di kampung Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan:

*“Sakali dalam saminggu amak turun ka Kampuang mamintak iyuran bareh tasarah urang tu mahagiah. Amak mintak samo amak-amak dikampuang tu untuak pasukan di dalam hutan. Kadang-kadang ado yang mahagiah bahan mantah salain bareh, mode ubi, karambia, pokonyo kabutuhan pokok untuak dimakanlah..!???”.*⁵⁴

Sebelum hal ini dilakukan, terlebih dahulu mereka bekerja sama dengan orang-orang kampung supaya gerak-gerik mereka tidak diketahui oleh tentara pusat

⁵⁴ Sekali dalam seminggu Ibu turun ke kampung meminta iyuran beras ala kadarnya kepada amak-amak (ibu-ibu) untuk bekal pasukan di dalam hutan. Kadang-kadang ada yang memberi bahan mentah selain beras seperti ubi, kelapa, dan kebutuhan pokok lainnya yang bisa dimakanlah..!???

maupun kaki tangan tentara pusat. Pada umumnya para isteri ini akan beraktifitas di dalam kampung jika situasi memungkinkan. Tetapi jika situasi memanas, mereka lebih memilih ikut bergerilya bersama suami ke dalam hutan.

Di dalam hutan mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sesekali mereka tinggal di gua-gua, di bawah pohon, dan di pondok ladang milik penduduk. Sebagian ada yang tinggal di pondok buatan anggota PRRI. Selain dibantu oleh tentara regular PRRI, para isteri ini juga dikawal oleh tentara sukarela atau disebut dengan kurir⁵⁵. Jumlah kurir ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota tentara regular PRRI. Mereka bertugas sebagai pengawal rombongan, sebagai penunjuk jalan, dan bertugas sebagai mata-mata. Pada umumnya mereka banyak mati ditembak tentara pusat karena dituduh sebagai mata-mata membantu anggota PRRI.

Bagi sebagian isteri-isteri yang mengikuti suaminya kedalam hutan, keamanannya terjamin karena secara langsung mereka terjaga oleh sang suami. Pada umumnya Isteri-isteri TNI Mantan PRRI Transmigran Angkatan Darat di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten pesisir Selatan ini mengikuti suaminya masuk hutan. Hal ini berbeda dengan yang dialami isteri-isteri TNI Mantan PRRI lainnya yang jauh dari pengawasan suami. Saat peristiwa bergolak, mereka tidak ikut suami dan memilih tinggal bersama keluarga di kampung. Akibatnya, ada peluang bagi mereka mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis. Seperti yang diungkapkan oleh Drs. SB Mansyur Sami⁵⁶:

⁵⁵ Kurir yang dimaksud adalah bukan dari anggota tentara regular PRRI (TNI), melainkan lebih disebut sebagai tentara sukarela (TAR). Mereka adalah masyarakat sipil yang mau bekerja sama membantu tentara regular TNI untuk mendukung PRRI dan rela berkorban untuk melawan tentara pusat. Sebagian mereka dibekali senjata untuk melawan tentara pusat.

⁵⁶ *Wawancara* dengan Drs. SB Mansyur Sami (85th) di Parupuk Tabing, Padang. Pada tanggal 26 Januari 2010. Saat pergolakan PRRI ia bertugas sebagai Asisten II Teritorial Divisi Banteng daerah Sumpur Kudus.

“Maso PRRI bagolak, kakek bagrelya di daerah Sumpur Kudus. Anak samo urang rumah kakek titipkan di tampek mintuo di Padang Panjang. Kakek dapek kaba dari intelegent baso bini kakek dibaok samo kadek PKI ka Bali. Menuruik kaba nan awak tarimo, ado duo urang pemuda mahasiswa UGM yang ingin melakukan praktek mengajar di Tawalib sabagai syarat mandapek'an gelar. Uran tu manumpang kos di rumah mintuo awak, tanyato balakangan tanyato diketaui urang tu adalah kader PKI yang barasal dari PNI. Mereka diutus untuak manggaduah kosentrasi kakek supayo pasukan kakek manyarah. Isteri kakek “dipaso” dan tajadi hubungan di lua nikah. Balakangan dikataui bini kakek hamil. Untuak maila'an raso malu samo urang kampuang, urang tu mambaok bini kakek ka Bali. Sampai kini kakek ndak parnah basobok lai samo sini kakek,,.”⁵⁷

b. Masa perang.

Menurut para isteri TNI Mantan PRRI, pergolakan PRRI yang terjadi saat itu menyisakan trauma yang begitu mendalam. Karena sebelumnya mereka pernah merasakan suasana perang semasa Belanda dan Jepang yang dampaknya tidak begitu pahit dirasakan. Suasana perang masa PRRI begitu mencekam karena perang ini melawan teman sendiri (Anggota TNI) dan mereka tidak tahu apakah yang dihadapi lawan atau kawan. Suasana saat itu menyeret mereka untuk berperan secara langsung dalam mendukung pergolakan. Mereka sangat faham bahwa yang dijalani tersebut beresiko bagi keselamatan jiwa mereka sendiri.

Selama tiga setengah tahun hidup di dalam hutan bukan merupakan waktu yang sebentar untuk harus mereka jalani. Pada awal pergolakan, mereka lebih banyak beraktifitas di dalam hutan karena saat itu situasi masih memanas. Tetapi, setelah

⁵⁷ Saat PRRI bergolak, kakek bergerilya di daerah Sumpur Kudus. Anak dan isteri kakek titipkan di tempat mertua di Padang Panjang. Kakek mendapat kabar dari intelegent bahwa isteri kakek dibawa oleh kader PKI ke Bali. Menurut kabar yang kakek terima, ada dua orang pemuda mahasiswa UGM yang ingin melakukan praktek mengajar di Tawalib sebagai syarat memperoleh gelar. Mereka numpang kos di rumah mertua kakek, ternyata belakangan diketahui mereka adalah kader PKI yang berasal dari PNI. Mereka diutus mengganggu konsentrasi kakek supaya pasukan dapat menyerah. Isteri saya “dipaksa” dan terjadi hubungan gelap. Belakangan diketahui isteri saya hamil. Untuk menghindari malu dengan orang kampung, mereka membawa istri kakek ke Bali. Sampai saat ini kakek tidak pernah bertemu lagi dengan isteri.

pergolakan berjalan setahun, mereka lebih banyak beraktifitas di dalam kampung sebagai mata-mata dan sesekali mereka masuk hutan untuk mengantar makanan.

Ada cara tersendiri bagi mereka jika ingin mengantarkan makanan atau ingin bertemu suami di dalam hutan. Terlebih dahulu para isteri ini harus melapor pada pos-pos PRRI yang berada di sekitar hutan kampung. Setelah itu mereka menitipkan pesan atau surat di pos-pos tersebut, bahwa mereka ingin bertemu dengan suami. Lalu anggota-anggota PRRI yang berjaga di pos tersebut akan memberi kontak kepada rekan-rekannya di dalam hutan.

Setelah tiga hari kemudian, para isteri kembali lagi ke pos tersebut untuk mengetahui kabar selanjutnya, apakah mereka dapat bertemu dengan suami atau tidak. Kadang-kadang mereka kecewa karena tidak bisa bertemu suami di dalam hutan. Hal ini dikarenakan posisi suami bergerilya di dalam hutan tidak jelas, kadang-kadang mereka bergerilya jauh dari pos-pos PRRI di dalam hutan. Jika mereka bisa untuk bertemu, mereka menyusul suami ke dalam hutan dengan di dampingi anggota sukarelawan PRRI (kurir). Seperti yang dialami oleh Siamsiarius:

“ . . .Masuak ka dalam rimbo tu acok amak lakukan wakatu barado di hutan Panarek. Untuak basobok jo apak anak-anak ko, amak harus manampuah pos-pos PRRI di dalam rimbo jo bajalan kaki. Naiak turun bukit kiro-kiro 20 kilo lah..!!!??, acok lo amak bamalam di dalam rimbo tu mah..!! ”⁵⁸.

Hal ini mereka lakukan hanya semata-mata demi cinta mereka kepada sang suami dan keluarga. Mereka rela menitipkan anak-anak mereka kepada orang kampung demi terjalannya komunikasi mereka dengan suami selama pergolakan tersebut.

Setelah berada di dalam hutan, tak jarang mereka merasakan serangan bertubi-tubi dari pihak APRI. Dengan senjata seadanya, pihak PRRI diserang dari darat

⁵⁸ . . .Masuk ke dalam hutan tersebut sering Ibu lakukan saat berada di hutan Panarek. Untuk bertemu dengan suami, Ibu harus menempuh pos-pos PRRI di dalam hutan dengan berjalan kaki naik turun bukit sejauh 20 Km dan Ibu harus bermalam di dalam hutan.

dan udara. Akibatnya banyak pasukan PRRI yang menjadi korban dari serangan tersebut. Seperti yang dialami oleh Nurkaya:

“Wakatu kajadian tu, nenek samo rombongan suami nan bajumlah kalau ndak salah 30 urang barado di rimbo Simabua. Wakatu tu kami sedang makan basamo jo manyusun rancana. Ndak sadar sedang lamak bacarito, tibo-tibo dari jarak kiro-kiro 500 meter tentara pusek ko manembak kami jo sanjato gerent jo mortar sacaro mambabibuto. . .!!, rombongan kami ndak ado pasiapan samo sakali, banyak anggota kami nan mati, sambilan urang lukoluko. Urang tu pado marintiah minta tolong, ado nan mamakiak maimbau lakinyo jo mancaliak sanaknyo mati. Wakatu tu laki nenek tatembak di bagian lutut sebelah kiri, salamo tigo bulan ndak bisa jalan. Wakatu tu anak-anak nenek manangih katakuik’an. Anak-anak ko nenek gendong sambia manjujuang barang jo manuntun laki yang lukoluko ka tampek aman.”⁵⁹

Tidak jarang mereka melihat korban-korban keganasan serangan tentara pusat. Akibat dari peristiwa ini, para isteri menjadi trauma bila mereka berhadapan langsung oleh anggota TNI yang berpakaian loreng. Menurut penuturan mereka, selama dalam pertempuran ini pihak PRRI jarang membalas serangan tentara pusat. Karena mereka kasihan dengan masyarakat yang tidak tahu apa-apa dengan masalah yang terjadi, sehingga banyak dari mereka yang menjadi korban dari keganasan tentara pusat. Tentara pusat bisa saja meminta lima pesawat dan senjata lebih ke Jakarta, tetapi PRRI tidak bisa. Jika pihak PRRI membalas satu serangan saja pasti balasannya bertubi-tubi ke wilayah PRRI.

Pada masa perang ini mereka harus menerima segala dampak yang ditimbulkan oleh perang yang seharusnya hal ini ditujukan untuk suami mereka. Tidak jarang kalau mereka harus ditangkap oleh tentara pusat, karena mereka dianggap

⁵⁹ Pada saat kejadian, saya dengan rombongan suami yang berjumlah kurang lebih 30 orang berada dalam hutan Simabua. Saat itu kami sedang makan bersama dan menyusun strategi. Tanpa disadari, dari jarak 500 Meter tentara pusat menembaki kami dengan senjata gerent dan mortir secara membabibuto. Rombongan kami tidak ada persiapan sama sekali, akibatnya banyak anggota kami yang mati dan sembilan orang luka-luka. Mereka merintih minta tolong dan ada yang teriak melihat keluarganya meninggal. Dalam kejadian ini suami saya tertembak di bagian lutut sebelah kiri dan selama tiga bulan tidak bisa jalan. Saat itu anak-anak saya ketakutan dan menangis. Akhirnya mereka saya gendong sambil menjunjung barang bawaan dan menuntun suami yang terluka ke tempat yang lebih aman.

bekerjasama dengan suami dan bisa menjadi umpan untuk merusak konsentrasi suami mereka (tentara PRRI). Mereka ditahan di pos-pos tentara pusat, disana mereka ditanyai tentang keberadaan suami dan data-data lengkap suami. Seperti yang diungkapkan oleh Nursidah:

*“Amak jo anak-anak pernah ditangkok tigo kali jo tantara pusek. Wakatu tu amak barado di sakitar daerah Lubeg. Amak dibao jo urang tu ka pos tantara pusek jo oto busuak. Di sinan amak ditanyo nan pantiang-pantiang se nyoh, contohnyo, laki tugas dima?, apo pangkek laki?, dimano nyo tugas?. Paliang lamo amak ditahan salamo duo hari. Salamo amak ditangkok, amak ndak dipanga-pangaannyo doh...!!, amak diagiah makan dan ditanyo elok-elok. Nan amak masih takuik juo wakatu tu.. urang tu mambebaskan amak jo syarat, amak harus mancari laki ka dalam rimbo, kok alah basobok baok nyo ka tantara pusek”.*⁶⁰

Pada umumnya isteri-isteri ini mendapatkan perlakuan baik dari tentara memihak pemerintahan pusat. Baik yang didatangkan dari Jawa, maupun tentara yang telah ada di Sumatera Barat sebelum pergolakan. Mereka tidak mendapatkan kekerasan fisik seperti ditampar, diperkosa, maupun dianiaya selama ditangkap. Tetapi hal ini tetap membuat mereka menjadi trauma dan takut mengalaminya.

c. Membesarkan anak-anak tanpa suami.

Menjaga dan membesarkan anak-anak tanpa didampingi suami selama tiga setengah tahun pergolakan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan beresiko untuk dijalani. Selain mendidik dan membesarkan anak, mereka juga harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena saat itu tidak selamanya mereka selalu bersama suami dan dikawal oleh suami. Jika dalam keadaan darurat,

⁶⁰ Ibu dan anak-anak pernah ditangkap tiga kali oleh tentara pusat. Saat itu Ibu berada di sekitar daerah Lubeg (Padang). Ibu dibawa mereka ke pos tentara pusat dengan menggunakan mobil *busuk* (Jip Rusia). Di sana mereka menanyakan data-data penting suami Ibu seperti; suami tugas di kesatuan mana?, apa pangkat suami?, dimana suami bertugas?, dan lain-lain. Paling lama Ibu ditahan selama dua hari. Selama Ibu ditangkap, Ibu diperlakukan dengan baik dan mereka memberi Ibu makan. Mereka membebaskan Ibu dengan syarat, yaitu Ibu harus mencari suami ke dalam hutan dan membawanya untuk menyerahkan diri kepada tentara pusat.

mereka bertemu suami hanya sekali dalam dua bulan, dan itupun hanya dalam waktu sebentar.

Dampak PRRI yang terjadi saat itu juga dirasakan oleh anak-anak mereka. Selama pergolakan, para isteri ini membawa anak-anak mereka ke dalam hutan. Kondisi anak-anak mereka saat itu sangat memprihatinkan. Di dalam hutan mereka harus merasakan kerasnya kehidupan layaknya orang dewasa. Mereka harus makan seadanya dan tinggal di tempat-tempat yang tidak layak untuk anak-anak seusia mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Zuraida:

*“Wakatu amak tinggal di rimbo, laki amak acok bagrelya jo rombongannyo salamo babulan-bulan. Amak jo anak-anak tinggal di pondok satinggi tigo meter, ba atok ilalang kariang, jo ba dindiang kulik kayu. Wakatu tu amak punyo ampek urang anak masih ketek-ketek, wakatu tu amak sedang hamil tuo. Amak hagiah makan anak-anak apo adonyo, makan nasi samo samba ikan asin alah sanang bana hati ko. Maklumlah,,,di tengah rimbo ndak ado apo-apo, anak-anak ko acok manangih, kadang-kadang sakik.”*⁶¹

Sebagian isteri-isteri ini ada yang membawa anak-anak mereka tinggal di dalam kampung dan menitipkannya dengan orang kampung yang mereka kenal. Akibat dari peristiwa ini, anak-anak mereka trauma dan putus sekolah.

Jauh dari suami dan tidak menerima uang belanja setiap bulannya mengharuskan mereka berperan ganda sebagai seorang isteri. Selain melahirkan dalam kondisi perang, mereka harus mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Karena saat itu pemerintah pusat memutuskan gaji suami yang seharusnya saat itu

⁶¹ Ketika Ibu tinggal di hutan, suami sering bergerilya dengan rombongannya selama berbulan-bulan. Ibu dan anak-anak tinggal di pondok setinggi tiga meter, beratapkan hilalang kering, dan berdinding kulit kayu. Saat itu Ibu mempunyai empat orang anak yang masih kecil-kecil dan dalam keadaan hamil tua. Ibu memberi makan seadanya kepada anak-anak. Makan nasi dan sambal ikan asin saat itu sudah sangat mewah. Anak-anak sering menangis dan sakit.

menjadi hak mereka juga. Walaupun perasaan takut dan cemas saat itu menghantui mereka, tetapi peran ini harus mereka jalani. Seperti yang diungkapkan oleh Samsiarius:

“wakatu tu nenek turun ka Kampuang dakek kelok sambilan (Indarung) mencari karajo sabagai buruah pangipeh padi. Kaadaan wakatu tu mamaneh, latuihan sanjato dari jauh tadanga kareh. . .dum!dum!dum!..nenek takuik jo cameh, suaronyo kancang bana, sampai nenek manggia, saking katakui'an amak marunduak se taruaih, takuik maliek tatara pusek nan malinteh dakek nenek bakarajo. Tapi, raso takuik tu hilang, dek maingek bareh yang ka dimasak wakatu tu habih, sadangelok untuka makan nenek jo anak-anak salamo tigo hari. Sado karajo nenek karajoan, asal anak-anak nenek bisa makan.”⁶²

Perasaan sedih, cemas, takut, dan penyesalan, bercampur jadi satu saat pergolakan itu. Rasa penyesalan sering kali muncul dalam diri para isteri ini ketika mereka sendirian berjuang menjaga dan membesarkan anak-anak. Menyesal sebagai isteri tentara yang harus siap dan menerima segala resiko dari pekerjaan suami dalam membela dan mempertahankan Negara. Tetapi, semua rasa itu hilang seketika karena rasa cinta mereka yang begitu besar terhadap keluarga.

d. Keluar hutan.

Setelah tiga tahun hiruk pikuk pergolakan PRRI, akhirnya perang ini berakhir setelah Jendral A.H Nasution (atas nama pemerintah pusat) membujuk pemimpin-pemimpin PRRI untuk menyerah atau dalam mereka “kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi”. Presiden Soekarno juga menyampaikan himbauannya dengan menjanjikan amnesty dan abolisi bagi para prajurit PRRI-Permesta yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebelum Oktober 1961. Semenjak seruan itu, mulai muncul fikiran dikalangan

⁶² Saat itu nenek turun ke kampung dekat kelok sembilan Indarung (Padang Besi) mencari pekerjaan sebagai buruh pengipas padi. Suasana saat itu memanas, letusan senjata dari kejauhan terdengar keras...dum!dum!dum!dum!(sambil mempraktekkan bunyinya). Saat itu nenek ketakutan, sampai-sampai nenek gemeteran dan merunduk ketakutan melihat tentara pusat melintas di dekat tempat nenek bekerja. Tetapi rasa takut itu hilang, karena beras yang dimasak saat itu sudah habis. Upah dari tukang kipas saat itu cukup untuk makan nenek dan anak-anak selama tiga hari. Apapun akan nenek lakukan, asalkan anak-anak nenek bisa makan.

anggota PRRI untuk mengakhiri perang saudara dan melakukan perdamaian. Akhirnya satu persatu rombongan PRRI keluar dari hutan menuju kota. Keadaan mulai sedikit aman pada pertengahan tahun 1961.

Para isteri tentara regular PRRI ini juga keluar dari dalam hutan bersama rombongan pasukan PRRI. Mereka keluar dan meninggalkan hutan bersama-sama menuju kota, sebagian keluar menuju kampung halamannya masing-masing. Menurut penuturan para isteri ini, mereka berbondong-bondong meninggalkan hutan dengan berjalan kaki menepuh jarak yang cukup jauh dan membawa sisa-sisa barang mereka selama tinggal di hutan. Mereka seperti pengungsi yang kalah perang. Sebagian besar dari isteri ini kembali ke kampung mereka masing-masing. Tanggapan orang-orang kampung terhadap penerimaan mereka (Isteri tentara regular PRRI) sangat beragam, hal ini sesuai dengan kampung-kampung yang mereka tempati.

Orang-orang kampung yang bangga menerima mereka kembali adalah kampung atau daerah dimana masyarakatnya yang selama pergolakan mendukung sepenuhnya PRRI. Sesampai di kampung, masing-masing isteri ini disambut dengan bangga oleh sanak saudaranya. Mereka bagaikan keluarga pahlawan yang berhasil berjuang. Para tetangga bersimpati dan merasa hiba dengan mereka. Mereka diberi pakaian dan makanan, karena semua kebutuhan mereka saat itu telah habis selama bergerilya di dalam hutan. Pada umumnya mereka numpang tinggal sementara di rumah sanak saudara, karena mereka tidak punya rumah dan sebelumnya mereka tinggal di asrama kesatuan suami. Setelah pergolakan usai, mereka tidak diperbolehkan lagi tinggal di asrama karena tentara pusat telah mengambil alih semuanya.

Lain halnya dengan sebagian isteri yang kembali bersama keluarganya ke kampung halaman yang seluruh masyarakatnya tidak mendukung PRRI. Tidak ada rasa

simpati ataupun bangga dari orang-orang kampung terhadap mereka. Tetapi yang ada hanya kebencian dan ejekan yang mereka terima. Keluarga mereka dianggap sebagai “pemberontak” yang membuat kerusuhan dan memecah belah persatuan. Seperti yang dialami oleh Hj.Ratna Dewi:

“ . . .Beberapa bulan setelah melahirkan, saya pulang ke kampung halaman di Suangai Limau (Pariaman). Semua orang-orang kampung mendukung tentara pusat dan beraliran Komunis(PKI). Mereka tidak senang dengan keberadaan kami, sampai-sampai anak yang baru saya lahirkan dibilang anak “harimau”. Karena saat itu suami saya sebagai Komandan Batalyon harimau Kuranji. Mereka ada yang dendam karena keluarganya ada yang terbunuh oleh tentara kuranji. Demi keamanan, saya dan keluarga pindah ke Padang dan membeli rumah di Mega Permai. ”⁶³

Perasaan senang dan sedih berbaur menjadi satu saat itu. Mereka senang keluar hutan dan kembali ke kampung lagi. Mereka merasa segala penderitaan perang telah berakhir dan anak-anak dapat bersekolah kembali. Bertemu sanak saudara dan berkumpul kembali dengan mereka merupakan sesuatu yang sangat berharga yang tidak pernah mereka temui selama berada di dalam hutan. Walaupun suasana sedikit berbeda dibandingkan sebelum pergolakan. Mereka merasa sedih karena pergolakan ini telah menimbulkan banyak korban jiwa terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan tidak mengerti apa-apa.

Disaat tentara pusat bangga dan berhasil menumpas pemberontakan, tetapi justru sebaliknya yang dirasakan oleh isteri-isteri ini. Mereka sedih karena sebagian orang menanggapi mereka sebagai keluarga “pemberontak”. Setelah mereka berbaur dengan lingkungan, ada perbedaan yang mereka rasakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menjadi latarbelakang nantinya mencari kehidupan lain di luar kampung.

⁶³ Beberapa bulan setelah melahirkan, nenek pulang ke kampung halaman di Suangai Limau (Pariaman). Semua orang-orang kampung mendukung tentara pusat dan beraliran Komunis (PKI). Mereka tidak senang dengan keberadaan kami, sampai-sampai anak yang baru nenek lahirkan dibilang anak “harimau”. Karena saat itu suami nenek sebagai Komandan Batalyon harimau Kuranji. Mereka ada yang dendam karena keluarganya ada yang terbunuh oleh tentara kuranji. Demi keamanan, nenek dan keluarga pindah ke Padang dan membeli rumah di Mega Permai.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab penutup ini, secara ringkas penulis membahas tiga uraian. Pertama, ringkasan yang berisi tentang ulasan pendek dari keseluruhan isi. Kedua, kesimpulan yang berisi tentang sari pati atau penyederhanaan dari jawaban penelitian, ketiga berupa saran untuk penelitian yang akan datang.

A. Ringkasan

Peristiwa PRRI merupakan akumulasi ketidak puasan daerah terhadap kebijakan-kebijakan pusat, terutama dalam bidang militer, politik, dan ekonomi. Dalam bidang militer bermula dari kebijakan RERA (Rekonstruksi dan Rasionalisasi) tahun 1949, tentang penyederhanaan struktur kesetaraan dan pengurangan jumlah pasukan Divisi IX Banteng yang hanya menyisakan sepertiga tentara. Padahal tentara tersebut adalah pejuang-pejuang kemerdekaan.

Dalam bidang politik, pemberontakan ini juga dipicu oleh penolakan empat calon Gubernur Sumatera Tengah yang diajukan oleh DPRST ke pemerintah pusat tahun 1950. Ironisnya, pemerintah pusat malah mengutus Roeslan Mulharjo yang notabenenya adala orang Jawa. Hal ini sangat melukai harga diri orang Minang. Pertentangan dengan budaya Minang sebagai penganut demokrasi. Krisis politik pusat dan daerah ini semakin parah ketika pemilu 1955, dan masuknya PKI dalam pemerintah.

Ketimpangan dibidang ekonomi terlihat jelas dalam pembangunan yang sentralistik, padahal 60% devisa berasal dari daerah. Janji-janji kehidupan yang lebih layak setelah kemerdekaan hanya menjadi angan angan rakyat yang tidak terealisasikan.

Jika diibaratkan kemerdekaan itu adalah kue, remah-remahnya pun tidak bisa mencicipi. Kemerdekaan itu tidak dinikmati oleh orang-orang yang memperjuangkannya.

Persoalan-persoalan tersebut bermuara pada Reuni 612 orang bekas Divisi Banteng tanggal 21-24 November 1956 yang bertempat di Balai Prajurit Padang. Secara umum, hasil reuni ini adalah memperjuangkan nasib para pejuang dan rakyat, maka dibentuklah Dewan Banteng yang diketuai oleh Ahmad Husein sebagai tindak lanjut dari Reuni. Upaya realisasi dari reuni yang dibuat ditandatangani oleh Gubernur Roeslan Muljoharjo, akibatnya pada tanggal 20 Desember 1956, Roeslan dikudeta oleh ketua Dewan Banteng.

Lebih lanjut, pada tanggal 10 Februari 1958, bergabunglah Dewan Banteng (Sumbar), Dewan Gajah (Sumatera Utara), Dewan Garuda (Sumatera Selatan) dan Permesta (Sulawesi) dalam Dewan Perjuangan yang melahirkan ultimatum terhadap pemerintahan Pusat. Akan tetapi, ultimatum juga tidak ditanggapi. Puncak dari kekecewaan ini adalah Proklamasi pada tanggal 15 Februari 1958. Ancaman setengah hati ini ditanggapi serius oleh pemerintah pusat dengan mengirim kekuatan perangnya ke Sumatera Barat, perang saudara tidak dapat dielakkan lagi. Akibatnya, Sumatera Barat lumpuh baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Akibat peristiwa ini, korban jiwa berjatuhan dari berbagai lapisan masyarakat. Khusus di daerah Operasi Kodam III/17 Agustus (Sumatera Barat/Riau), menelan banyak korban dikedua belah pihak sebanyak 7.146 orang, 1.944 luka, dan 321 orang hilang. Korban terbesar diderita oleh PRRI yaitu sebanyak 6.115 orang dan yang hilang 627 hilang. Sedangkan dari Kodam III/APRI tercatat meninggal sebanyak 1.031, yang terdiri dari tentara 329 orang, polisi/Brimob 56 orang, OPR 67 orang, pegawai 7 orang, dan rakyat 572 orang. Menurut data dari Nasution, korban jiwa sebanyak 22.174

orang, luka-luka 4.360, dan ditawan 8.072. Terdiri dari 2.499 tentara, 956 anggota OPR, 274 polisi, dan 5.592 orang sipil.

Banyak masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban dari keganasan tentara pusat, hal ini berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat Sumatera Barat. Terutama dialami oleh isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat mantan PRRI. Mereka sebagian kecil dari isteri-isteri tentara regular mantan PRRI yang mengalami nasib yang pahit pada masa itu. Berbagai dampak pergolakan PRRI telah dialami oleh semua lapisan masyarakat Sumatera Barat, tidak terkecuali bagi isteri-isteri Transmigran Angkatan Darat mantan PRRI. Pengalaman pahit ini mereka alami bertahun-tahun, mulai dari mengikuti suami bergerly, bertahan hidup selama pergolakan, dan mendapat ancaman terror dan penghinaan sebagai “pemberontak”. Secara fisik, pergolakan tersebut telah usai, namun pengalaman ini masih mereka rasakan setelah menempati daerah Transmigrasi Angkatan Darat Kabupaten Pesisir Selatan, yang pada umumnya pensiunan TNI. Secara struktur mereka telah diberi hak-hak TNI, salah satunya mendapatkan rumah dan 2,5 Ha tanah secara cuma-cuma. Namun secara psikologis, mereka masih mengalami tekanan sosial akibat cap sejarah sebagai “pemberontak” yang mereka terima selama tinggal di tempat ini.

B. Kesimpulan

Pergolakan PRRI membawa dampak yang signifikan dibidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya Isteri-isteri TNI Mantan PRRI yang suaminya secara langsung ikut terlibat dalam peristiwa PRRI. Pengalaman yang mereka alami bukan berupa dampak kekerasan fisik seperti dianiaya dan diperkosa, melainkan dampak psikis (kejiwaan) seperti tekanan sosial akibat cap sejarah sebagai pemberontak. Selama pergolakan PRRI berlangsung isteri-isteri TNI

Mantan PRRI merasakan beban mental yang harus ditanggung seperti; mengikuti suami ke dalam hutan, berjuang tanpa suami untuk membesarkan anak-anaknya, mendapat ancaman terror, dan penghinaan sebagai “pemberontak”. Secara fisik, pergolakan tersebut telah usai, namun pengalaman pahit ini masih dirasakan oleh isteri-isteri TNI Mantan PRRI setelah menempati Transmigrasi Angkatan Darat yang pada umumnya terdapat pensiunan TNI, tidak terkecuali TNI Mantan tentara pusat yang pernah menjadi musuh mereka masa PRRI. Secara struktur, mereka telah diberi hak-hak TNI kembali, salah satunya adalah mendapatkan satu unit rumah dan 2,5 Ha tanah secara cuma-cuma di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, di tempat ini pulalah secara psikologis mereka masih mengalami tekanan sosial akibat cap sejarah sebagai “pemberontak” yang telah memecah belah persatuan Indonesia.

C. Saran

Sebagai bagian dari sejarah Indonesia kontemporer, era PRRI tidak pernah kering untuk terus digali. Adalah suatu kesalahan fatal bila ada orang yang mengatakan bahwa permasalahan PRRI adalah permasalahan usang yang tidak perlu ditulis kembali. Melihat berbagai bentuk penulisan hasil karya sejarah tentang PRRI, dan berdasarkan perkembangan baru arah penulisan sejarah, maka penulis menyarankan adanya penulisan lain yang menuliskan sejarah PRRI yang dialami oleh masyarakat Sumatera Barat yang berada di daerah lainnya. Tentunya tulisan ini memperkaya khasanah penulisan sejarah lokal di Indonesia, yang sangat mempengaruhi penulisan sejarah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Audrey Kahin, *"Dari Pemberontakan ke integrasi; Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998"*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2005)
- _____, *"Subversi sebagai Politik Luar Negeri (menyikap keterlibatan CIA di Indonesia)"*. (Jakarta : Grafiti Press.1997)
- Arief Furqan dan Agus Maimun, *"Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh"*.(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005)
- Azmi Fitriisa, dkk,"*Panduan Penulisan Penulisan Proposal dan Skripsi Sejarah*". (Jurusan Sejarah: UNP, 2003)
- Barbara Sillars Harvey, *"Pemberontakan Kahar Muzakkar dari tradisi ke DI/TII"*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.1989)
- _____, *"Permesta: Pemberontakan Setengah Hati"*. (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti. 1984)
- Dedi Rachmat, dkk. *"Tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan & kesatuan bangsa: kasus PRRI"*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1992)
- Departemen Pendidikan direktorat Jendral Kebudayaan, *"Dari Dewan Benteng ke PRRI (kemiripan sejarah yang berulang di era Reformasi)"*. (Padang: BPSNT. 2000)
- Departemen pertahanan dan keamanan Nasional, *"Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta"* Padang, 1977.
- Djoko Subroto, *"visi ABRI menatap masa depan"*, (Magelang: Gajah Mada University Press. 1997).
- Fran Van Magnis suseno. *"Konflik dan harmoni: pengelolaanya dalam wawasan"*. Dalam Prisma (Jakarta: LP3S. 1985).
- Mestika Zed, *"Sumatera barat di panggung sejarah 1945-1950"*. (Jakarta : Pustaka Sinar harapan.1998).
- _____, *"GIYUGUN, Cikal bakal Tentara Nasional Di Sumatera Barat"*.(Jakarta: LP3ES, 2005).
- Mestika Zed & Hasril Chaniago. *"Perlawanan Seorang Pejuang (Biografi Ahmad Husein)"*. Jakarta Pustaka Sinar Harapan. 2001
- Kuntowijoya, *"Metodologi Sejarah Edisi kedua"*.(Yogyakarta : Tiara Wawancara, 2003).

- Marwati Joened, "*Sajarah Nasional Indonesia IV*". (Jakarta : Balai Pustak).
- Matindas, dkk." *Permesta & PRRI bukan separatist (wawancara eksklusif dengan Ventje Samuel*". (Jakarta: LKSI Press. 2007).
- R.Z. Leirissa, "*PRRI PERMESTA Strategi membangun Indonesia tanpa Komunis*". (Jakarta : Grafiti. 1991).
- Soewardi Idris, "*Perjalanan dalam kelam (senarai kisah pemberontakan PRRI)*". (Beranda : Jakarta. 2008).
- _____, "*Pergolakan daerah (senarai kisah pemberontakan PRR)*". (Beranda : Jakarta. 2008).
- Hadi Soebandio. "*Keterlibatan Australia dalam pemberontakan PRRI/Permesta*". (PT. Pustaka Utama Graffiti : Jakarta. 2002).
- Soejono Soekanto, "*Sosiologi suatu pengantar*". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1987).
- Syamdani, "*PRRI: Pemberontak atau Bukan*". (Media Pressindo: Jakarta. 2009).
- Sayidiman Suryohadiprojo, "*Kepemimpinan ABRI (dalam sejarah dan perjuangannya)*". (Jakarta: Intermasa.1996).
- Zusneli Zubir, dkk. "*Peran anak Nagari pada masa perang (Studi kasus Nagari Situjuh Batua Kab. 50 kota dalam peristiwa PDRI & PRRI 1948-1966)*". (Padang: Balai pelestarian sejarah & nilai tradisional.2008).

B. Skripsi / Tesis

- Amin Hoteb, "*Keterlibatan pemuda dalam PRRI*". (UNP : Padang, 2004).
- Syaflison, "*Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Masa PRRI (1958-1961)*". (STIKIP PGRI Padang, 2009).
- Syamdani, "*PRRI Pemberontakan atau Pergolakan : Sebuah tinjauan Historiografi*". (UNP : Padang, 2000).
- Mursal Y, "*Konflik Sosial di Nagari Lasi Periode PRRI (1958-1965)*". (UNP: Padang, 1993).
- Reni Nuryanti. "*Kehidupan Perempuan di Minangkabau Pada Masa PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) 1958-1961*". Tesis. (Yogyakarta; Program S2 Universitas Gajah Mada. 2009.)
- Yuliana Susanti, "*Dampak Pemberontakan PRRI bagi Masyarakat Taram Kabupaten 50 Koto Sumatera Barat (1958-1966)*". Unand, 2005.
- Weftriyawati, "*Konflik Sosial di Kayutanam Masa PRRI*". (UNP: Padang. 2004)